

**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



Oleh

**Nama : MUHAMAD TAUFIK LUBIS
NPM : 15050180032
Program Studi : Ekonomi Pembangunan**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019, pukul 09:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : MUHAMAD TAUFIK LUBIS
NPM : 1505180032
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS DAMPAK KEBLIJAKAN DANA DESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

Tim Penguji

Penguji I

(Dra. Hj. LAILAN SAFINA HSB, M.Si)

Penguji II

(HASTINA FEBRIATY, SE, M.Si)

Pembimbing

(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris



(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : MUHAMAD TAUFIK LUBIS

N.P.M : 1505180032

Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN

Judul Skripsi : ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN DANA DESA
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KECAMATAN
PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2019

Pembimbing Skripsi

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

H. JANURI, SE, MM, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMAD TAUFIK LUBIS
N.P.M : 1505180032
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
21/4-2019	Background hrs byr diurut hrs sesuai dgn rumusan masalah dan tujuan Penelitian skripsi.		
27/4-2019	Rumusan masalah dan Tujuan Penelitian dari skripsi, hrs diarahkan pd Bab II		
08/07-2019	Bab II urutannya : Teori - Penelitian - Pendekatan - Kenapa Penelitian hrs sesuai dgn buku.		
20/07-2019	Bab II msh byr yg hrs dilengkap y Penelitian Terdahulu dan tahapan y yg akan dilakukan.		
01/08-2019	Bab III, Metode Penelitian y Data primer dan Sumber Data. yg akan digunakan y Penelitian		
25/08-2019	Teknis Analisis Data hrs seputar dgn tujuan. Penelitian y diurutkan		
29/8-2019	Sama halnya sdh direvisi Sup y Sidney Myn Hajar !!		

Medan, 29 Agustus 2019
 Diketahui /Disetujui
 Ketua Program Studi
 Ekonomi Pembangunan

Pembimbing Skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : MUHAMAD TAUFIK LUBIS
N.P.M : 1505180032
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Proposal : ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
18/12 - 2018	Revisi judul skripsi dan LB masalah hrs lbe Nayach Laji		
28/12 - 2018	Bab I revisi lagi tentang tambahkan Data baru lbe bijus dan fokus		
11/1 - 2019	Bab I, susunakan dgn idub pbs dan Bahasan mslh + Tujuan mslh dan Tujuan dr Penelitian		
15/1 - 2019	Bab II, revisi banyak dan di susunakan dgn urutan yg telah sy buat		
20/1 - 2019	Tahapan Penelitian dan kelayakan Model Penelitian dr Proposal hrs disusunakan agar lobe dgn Tujuan		
21/1 - 2019	Bab III, susunakan dan tambahkan Model Analisa Faktor di Belian Metodeli Penelitian		
22/1 - 2019	All in sh ok!!! ACC 4/ di seminar kan !!!		

Pembimbing Proposal

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Medan, 22 Januari 2019
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 30 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Pada hari ini MUHAMMAD TAUFIK LUBIS tanggal Kamis, 31 Januari 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan MUHAMMAD TAUFIK LUBIS menerangkan bahwa :

N a m a : MUHAMMAD TAUFIK LUBIS
N .P.M. : 1505180032
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 04 Desember 1996
Alamat Rumah : Persatuan Pasar 10 Tembung
JudulProposal : ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	-
Bab I	-
Bab II	- Perbaiki bagian tahapan penelitian
Bab III	- Perbaiki penarikan sampel
Lainnya	
Kesimpulan	<input type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, Kamis, 31 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.PRAWIDYA HARIANI RS., S.E., M.Si.

Pembimbing

Dr.PRAWIDYA HARIANI RS, SE., M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.ROSWITA HAFNI, M.Si.

Pemanding

Dra.Hj.LAILAN SAFINA, M.Si.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapl. Mukhtar Basri No 3 Tel. (061) 6624567 Ext 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari *Kamis, 31 Januari 2019* menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD TAUFIK LUBIS
N .P.M. : 1505180032
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 04 Desember 1996
Alamat Rumah : Persatuan Pasar 10 Tembung
JudulProposal : ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan

pembimbing : *Dr.PRAWIDYA HARIANI RS,SE.,M.Si.*

Medan,Kamis,31 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.PRAWIDYA HARIANI RS,SE., M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.ROSWITA HAFNI, M.Si.

Pembimbing

Dr.PRAWIDYA HARIANI RS,SE.,M.Si.

Pembanding

Dra.Hj.LAILAN SAFINA,M.Si.

Diketahui / Disetujui

A.n. Dekan

Wakil Dekan - I

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.

ABSTRAK

Dalam skripsi ini diangkat berdasarkan fenomena yang terjadi dalam perekonomian di Indonesia. Kebijakan pembangunan terus dilanjutkan dan ditingkatkan yaitu pemerataan pembangunan dan hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional dan regional yang sehat dan dinamis. Kemiskinan merupakan permasalahan Indonesia, sehingga harus jadi perhatian pemerintah guna penanggulangan kemiskinan tersebut. Munculnya program bantuan sosial yang dicanangkan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk melakukan analisa secara deskriptif perkembangan Dana Desa dan jumlah Rumah tangga miskin di Kecamatan Percut Sei Tuan. Serta melakukan evaluasi PKH dalam meningkatkan kualitas hidup Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer dan sekunder. Dengan variabelnya Kemiskinan, Program dana desa, Kualitas hidup, Perkembangan ekonomi lokal. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin di Kecamatan Percut Sei Tuan yang berjumlah 8.131 KK dengan menggunakan sampel sebanyak 100 responden. Teknik sampling yang digunakan adalah *accidental sampling*. Program Keluarga Harapan (PKH) sudah baik, hal ini dapat dilihat dari anak keluarga penerima manfaat bantuan PKH usia sekolah yang sudah terdaftar dan mengikuti kehadiran sekolah 85% serta partisipasi kesadaran ibu hamil/menusui dan mempunyai anak balita untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin sehingga anak-anak mereka tidak terserang gizi buruk serta anaknya kelak memutuskn rantai kemiskinan.

Kata kunci: PKH, DD, Kemiskinan, Perkembangan Ekonomi Lokal

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil' alamin, dengan kesungguhan hati penulis mengucapkan rasa syukur yang tidak ada hentinya kepada sang Khalik, sang Maha Pencipta yang telah memberikan nikmat yang luar biasa bagi penulis. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, kesempatan dan hidayah- Nya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan berupa penelitian dengan judul **“Analisis Dampak Kebijakan Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”** dengan sebaik mungkin.

Shalawat berangkaikan salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah membawa kita para umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu, penuh dengan amal dan penuh dengan iman sampai saat sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam penelitian ini belum sempurna karena kurangnya kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam merangkai kata- kata menjadi suatu karya tulis yang baik. Oleh karena itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima kritik untuk menyempurnakan penelitian ini.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. **ALLAH SWT**, yang telah memberikan Rahmat serta Rezeki-Nya yang luar biasa serta nikmat iman dan kesehatan kepada penulis. Dan atas izin-Nya yang memberikan kesempatan kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta dan tersayang yang telah memberikan kasih sayang, yang telah membesarkan, mendidik, memberikan dukungandando'anyasehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dan kelak bisa menjadi orang yang sukses.
3. Bapak Dr. Agusani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januari, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Hadriman Khair S.P., M.Sc selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan/ arahan/ kritik kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
6. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, SE, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
7. Ibu Roswita Hafni, MSi selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh dosen-dosen yang telah mengajarkan penulis dari semester satu hingga akhirterkhususdosen-dosen Prodi Ekonomi Pembangunan,

serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama ini.

9. Terimakasih untuk Nurwataniah yang sudah selama ini membantu dan menemani saya dalam proses pembuatan skripsi ini.

10. Untuk keluarga Encu, Julyanti Simehate M, Anisha P.C Sitepu, Tasya Dinita, Dicky Prasetyo, Yunus Supriadi, fuady rangkuti, Fariz Rionaldi yang selaluber bagicerita bersamadan support yang tiadahentinya.

Penulis mengharapkan semoga Skripsi Penelitian ini memberikan manfaat dan berguna bagi pembaca secara umum dan menjadi pembelajaran bagi peneliti yang akan meneliti pada pembahasannya tersebut serta ter khusus bermanfaat bagi penulis akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Agustus 2019

M. Taufik Lubis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	26
1.3 Batasan dan Rumusan Masalah.....	27
1.4 Tujuan Penelitian.....	28
1.5 Manfaat Penelitian.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
2.1 Landasan Teoritis.....	30
2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi.....	30
A. Teori Klasik.....	32
B. Teori Keynes.....	36
2.1.2 Teori Perumbuhan Ekonomi.....	39
A. Teori Klasik.....	41
B. Teori Keynes.....	42
C. Teori Neo-Klasik.....	45
2.1.3 Keuangan Negara.....	47
A. Teori Pengeluaran Pemerintah.....	47
B. Teori Pendapatan Pemerintah.....	53
2.2 Kebijakan (Regulasi).....	55
A. Desentralisasi Fiskal.....	55

B. Kemiskinan.....	58
C. Kebijakan Dana Desa.....	62
2.3 Penelitian Terdahulu.....	67
2.3 Kerangka Penelitian.....	69
BAB III METODE PENELITIAN.....	71
3.1 Pendekatan Penelitian.....	71
3.2 Defenisi Operasional.....	71
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	72
3.4 Jenis Sumber Data.....	72
3.5 Populasi Dan Sampel.....	73
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	74
3.6 Teknik Analisis Data.....	74
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	77
4.1 Gambaran Umum Geografi dan Demografi.....	77
4.1.1 Letak Geografis.....	77
4.1.2 Kondisi Topografi.....	81
4.1.3 Kondisi Ekonomi.....	82
4.1.4 Kondisi Sosial.....	87
4.2 Kecamatan Percut Sei Tuan.....	89
4.2.1 Geografi.....	89
4.2.2 Kondisi Demografi.....	91
4.2.3 Perkembangan Dana Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan.....	95
4.3 Analisis Deskriptif Secara Ekonomi.....	97
4.3.1 Perkembangan Dana Desa Dan Jumlah Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Percut Sei Tuan.....	97
4.3.1 Analisis Perkembangan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten	

Deli Serdang.....	98
BAB V Kesimpulan Dan Saran.....	115
5.1 Kesimpulan	115
5.2 Saran.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang terus menerus dilaksanakan melalui suatu Perencanaan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek. Dengan kata lain pembangunan merupakan suatu upaya perbaikan yang dilakukan secara terus menerus dari kondisi yang sebelumnya tidak baik menjadi lebih baik. Masalah pembangunan di Indonesia selalu di tujukan kepada pertumbuhan Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi dan peningkatan pendapatan perkapita.

Pembangunan pada intinya bertujuan untuk menjadikan kehidupan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Sejahtera merupakan kondisi tidak miskin dan menjadi keinginan setiap orang, sedangkan kemakmuran merupakan bagian yang memungkinkan orang-orang bermasyarakat dengan baik, tenang dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik (Todaro & Smith, 2006).

Pembangunan merupakan pembentukan modal karena untuk mencapai target pembangunan yang tinggi pada suatu negara dibutuhkan nilai investasi yang besar. Sehingga strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan cara mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi (Kuncoro, 2010).

Sasaran umum pembangunan ekonomi adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara bertahap, terciptanya lapangan kerja yang memadai bagi penurunan pengangguran, serta berkurangnya jumlah penduduk miskin. Untuk mewujudkan sasaran tersebut ditempuh berbagai program pembangunan terpadu salah satunya mengurangi pengangguran dan kemiskinan dengan membangkitkan sektor riil agar menciptakan lapangan kerja, diimbangi upaya pengurangan pengangguran dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang memberi manfaat baik bagi tenaga kerja maupun pengusaha. Dengan kebijakan ini, kegiatan ekonomi akan lebih terdorong untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Dalam jangka menengah produktivitas tenaga kerja ditingkatkan agar sumber daya manusia mampu mendorong daya saing perekonomian nasional. Untuk membantu pembangunan ekonomi perlu adanya peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi meliputi peningkatan prasarana transportasi, kelistrikan, energi, telekomunikasi dan informasi. Dalam jangka pendek upaya penyediaan sarana dan prasarana ini ditekankan pada pemeliharaan dan rehabilitasi pada sarana dan prasarana umum agar sarana dan prasarana yang sudah ada mampu memberi dukungan yang maksimal bagi kegiatan ekonomi masyarakat.

Pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan di Indonesia. Proses pembangunan memerlukan *Gross National Product* (GNP) yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dibanyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan

sesuatu yang sangat dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang baguspun menjadi tidak akan berarti bagi masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan penurunan yang tajam dalam pendistribusian atau pemerataannya.

Pembangunan Nasional Indonesia tidak terlepas dari sasaran “Pembangunan Berkelanjutan” (*Sustainable Development*). *Sustainable Development* yang dipopulerkan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) yang dibentuk oleh PBB lewat publikasi bukunya yang berjudul *Our Common Future*. Tugas utama Komisi itu mengadakan penelaahan penyerasian lingkungan (*environment*) dan pembangunan (*development*) yang dalam kenyataannya sering dipertentangkan satu dengan yang lain.

Sistem pembangunan mempunyai tujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercantum pada tujuan *Millennium Development Goals*(MDGs) sebagai komitmen untuk meniadakan kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan manusia pada tahun 2015. *Millennium Development Goals*(MDGs) merupakan suatu sistem yang menunjukkan komitmen internasional untuk mengakhiri kemiskinan global. Adapun tujuan pertama *Millennium development Goals*(MDGs) untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan kelaparan. Setelah MDGs berakhir di tahun 2015, Indonesia menerapkan pembangunan dalam mengatasi tingkat kemiskinan untuk kemajuan pembangunan sesuai dengan penyempurnaan tujuan dan target SDG yang tersusun dalam 17 poin yang akan berlaku hingga tahun 2030.

Sustainable Development Goal's (SDGs) memiliki 17 tujuan *Global Goals* Salah satu diantara 17 tujuan itu terdapat pada poin pertama yaitu

mengentaskan segala kemiskinan. Tujuan ini berbicara tentang meningkatkan pendapatan pada penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana. Berbagai sudut pandang untuk menggambarkan kemiskinan dibutuhkan berbagai tanggapan yang terkordinasi.

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan Nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia.

Kebijakan pembangunan terus dilanjutkan dan ditingkatkan yaitu pemerataan pembangunan dan hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional dan regional yang sehat dan dinamis. Namun dalam keberhasilan pembangunan nasional selama ini masih ditemui beberapa aspek kehidupan masyarakat yang belum banyak tersentuh oleh pembangunan. Diantara aspek kehidupan masyarakat yang belum terselesaikan secara tuntas adalah masalah kemiskinan yang terjadi dimana-mana. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional / Susenas di Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya mempunyai 49,5 juta jiwa penduduk yang tergolong miskin telah terjadi penurunan yang luar biasa dalam tingkat kemiskinan dibandingkan pada negara-negara sedang berkembang lainnya.

Pemerataan pembangunan ekonomi menyebabkan timbulnya ketimpangan wilayah (*regional disparity*). Hal ini terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang, atau kurang maju. Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan karena adanya perbedaan antara wilayah satu dengan lainnya. Mengemukakan salah satu permasalahan ketimpangan yang menonjol di Provinsi Sumatera Utara adalah kesenjangan antar daerah, sebagai konsekuensi dari terkonsentrasinya kegiatan perekonomian di Wilayah yang berdekatan dengan Ibukota Provinsi.

Ketimpangan memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari adanya ketimpangan adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas social, dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi, pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro & Smith, 2006). Ketimpangan menyebabkan inefisiensi ekonomi sebab ketimpangan yang tinggi, tingkat tabungan secara keseluruhan di dalam perekonomian cenderung rendah, karena tingkat tabungan yang tinggi biasanya ditemukan pada kelas menengah. Meskipun orang kaya dapat menabung dalam jumlah yang lebih besar, mereka biasanya menabung dalam bagian yang lebih kecil dari pendapatan mereka, dan tentunya menabung dengan bagian yang lebih kecil lagi dari pendapatan marjinal mereka (Todaro & Smith, 2006). Dampak negatif inilah yang menyebabkan ketimpangan yang tinggi menjadi salah satu masalah dalam pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan di suatu wilayah pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dari kesejahteraan

masyarakat, Dimana ketika suatu wilayah memiliki pertumbuhan yang tinggi, maka wilayah tersebut dapat dikatakan wilayah yang makmur.

Realisasi dan desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antara desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, pasal 199 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan serta dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 BAB III yang mengatur prioritas pengguna dana desa pasal 5 yang menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui.

- a) Pemenuhan kebutuhan dasar
- b) Pembangunan sarana dan prasarana desa
- c) Pengembangan potensi ekonomi lokal
- d) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan



Gambar 1.1Perkembangan Dana Desa TA 2018

Sumber: Kementerian Desa RI (www.kemendes.go.id)

Dilihat dari tabel diatas, bahwasannya Dana Desa (DD) dari tahun 2015 sampai dengan 2017 selalu mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2015 hanya sebesar Rp. 20 miliar meningkat pesat menjadi Rp. 60 miliar pada tahun 2017, diikutin dengan bertambahnya jumlah Desa setiap tahunnya yaitu pada 2017 yang sudah mencapai 74.954 desa di seluruh Indonesia. Meningkatnya Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa sehingga dapat menekan tingkat kemiskinan di Desa, hal tersebut merupakan sesuai program dari pemerintahan Jokowi-JK untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daaerah dan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan melakukan pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia. Sehingga dengan adanya pembangunan desa tersebut maka diharapkan dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal untuk dapat mengurangin tingkat kemiskinan di desa

Secara geografis, Provinsi Sumatera Utara berada di posisi antara 10 dan 40 derajat Lintang Utara dan 98,0 hingga 10,00 derajat Bujur Timur. Ini

merupakan wilayah yang strategis. Daerah ini luasnya mencapai 71.680,68 km persegi atau 3,72 persen dari luas wilayah Republik Indonesia. Wilayahnya ini terdiri dari 162 pulau, yaitu 6 pulau di pantai timur dan 156 pulau di pantai barat. Bagian timur Sumut persis di jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Bagian baratnya berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Sumut juga berada dekat dengan negara Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dengan posisi seperti itu, Sumut merupakan wilayah potensial sebagai hub internasional. Masalahnya, hingga 2015, jangankan menjadi prioritas, potensi besar Sumut tersebut belum sepenuhnya tersentuh, bahkan boleh dibilang masih tertinggal. Infrastruktur jalan, misalnya sejak Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), belum ada kemajuan yang signifikan. Kondisi infrastruktur jalan nasional di Sumut merupakan yang terburuk jika dibandingkan jalan nasional di daerah lain di Pulau Sumatera. Ratusan kilometer jalan nasional rusak. Hanya di Sumut pula masih ada jalan nasional yang berupa tanah.

Pengembangan wilayah Sumut memiliki nilai strategis, selain menjadi penghubung langsung ke dunia internasional, Sumut juga bisa menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi bagi kepulauan Sumatera pada umumnya dan tiga wilayah yang berbatasan langsung, yakni Provinsi Aceh di sebelah utara, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Barat di sebelah selatan, dasar pemikiran itu maka pembangunan wilayah Sumut tidak bisa berdiri sendiri. Dukungan dari wilayah sekitarnya sangat dibutuhkan. Pemerataan pembangunan di Sumut dan sekitarnya juga harus diwujudkan, dengan kata lain perlu ada jalinan kerja sama khususnya daerah yang berbatasan langsung dengan Sumut, akselerasi itu

dibutuhkan tidak hanya keluar wilayah yang berbatasan dengan Sumut, tetapi juga ke dalam.

Ketimpangan Pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata sehingga berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia. Pembangunan di Sumatera Utara selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup berarti dalam skala nasional, Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara senantiasa relatif lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi lahan yang cukup luas dan subur yang bisa dikembangkan. Selama Alokasi Dana Desa (ADD) berjalan hampir tujuh tahun, masih dirasakan kurang efektif, hal ini dapat dilihat dari masih lambatnya penurunan kemiskinan di daerah kecamatan percut sei tuan kabupaten Deli Serdang. Sebagai upaya masyarakat untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhusuan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sumatera Utara sendiri telah banyak desa yang menjadi contoh kesuksesan pemanfaatan dana desa memanfaatkan alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur penahan longsor di daerah rawan dan perbaikan jalan sehingga dapat meminimalisir bencana serta memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Jumlah bantuan dana desa tahun 2018 untuk Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Jika pada tahun anggaran (TA) 2017 Sumut mendapat alokasi sebesar Rp.4.197.972.490.000, pada tahun ini hanya sekitar Rp. 3.879.675.435.000. Hal ini dikarenakan adanya

perubahan cara perhitungan penetapan dana desa tersebut. Terjadi pengurangan karena ada perubahan cara perhitungannya yaitu dengan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi dan alokasi formula sesuai dengan Kepmenkeu No.226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota TA.2018," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sumut.

Penetapan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, kemudian direvisi oleh UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dimana pemerintahan daerah diberikan wewenang untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan. Aglomerasi yang cukup tinggi akan menyebabkan pemerintahan daerah cenderung lebih cepat, kondisi tersebut akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat (Sjafrizal, 2008), akan tetapi bagi daerah yang memiliki tingkat aglomerasi rendah akan membuat daerah tersebut semakin terbelakang.

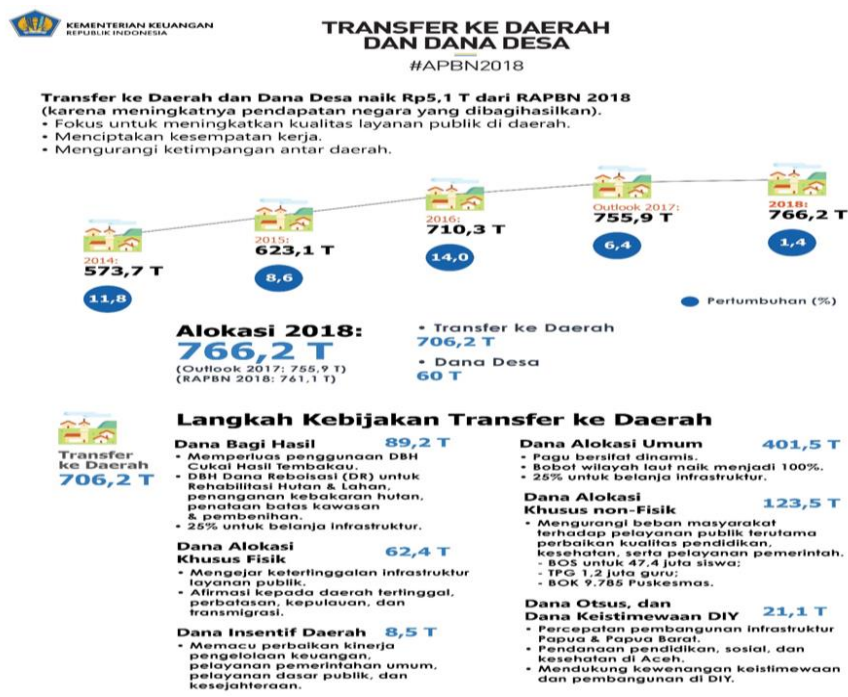
Penetapan kebijakan desentralisasi fiskal merupakan dari APBN tentang Transfer daerah dimana pemerintahan diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri diharapkan dapat mengurangi wewenang wilayah. Desentralisasi tidak hanya di kaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan, tetapi juga adanya

kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat (Kuncoro, 2004). Sebagai upaya dalam mengatasi ketimpangan daerah, pada tahun 2001 pemerintah Indonesia melakukan sebuah kebijakan yaitu kebijakan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal, dengan alasan bahwa kebijanka pembangunan yang ditetapkan pemeritahan pusat tidak bisa diterapkan di seluruh daerah, daerah yang memiliki daya dukung dan sesuai dengan kriteria kebijakan nasional akan dengan mudah meyerap peluang pembangunan, sedang daerah yang tidak sesuai kriteria kebijakan nasioanl akan mengalami keterlambatan pembangunan. Sehingga dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, diharapkan optimalisasi pembangunan akan terjadi dimana kebijakan pembangunan ini disesuaikan dengan pontensi dan permasalahan daerah.

Pemerintah menganggarkan dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar 764,9 triliun. Anggaran tersebut telah melebihi anggaran belanja Kementerian/Lembaga Seperti diketahui, anggaran transfer ke daerah dan dana desa merupakan bagian dari desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang digunakan untuk memformulasikan kembali struktur hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi dan pemanfaatan sumber daya, dalam acara Rapat Kerja Nasional Kementerian Keuangan pada Senin kemarin, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Boediarso Teguh Widodo, menyampaikan materi mengenai Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan tema “Evaluasi APBN-P 2016 dan Tantangan Pelaksanaan APBN 2017”.

Menyampaikan bahwa sejak tahun 2016, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah ditetapkan lebih besar daripada anggaran Belanja Kementerian/Lembaga. Nilai tersebut terus dijaga dalam APBN tahun 2017 dengan mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp764,9 triliun, sedangkan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dialokasikan sebesar Rp763,6 triliun.

Kemudian terjadi kenaikan terhadap tranfer dana ke daerah dan desa pada tahun 2018 sebesar 766,2 terliun



Gambar 1.2 Transfer ke daerah dan dana desa

Sumber : <http://www.djpk.depkeu.go.id>

Naiknya anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa ini bertujuan untuk mewujudkan Nawacita ketiga yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap negara baik negara berkembang maupun negara maju tentunya melaksanakan

pembangunan guna mencapai tujuan atau cita-citanya yaitu meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan bangsanya. Menurut TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004 menjelaskan bahwa pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menjadi salah satu isu sentral yang menjadi perbincangan ketatanegaraan pada saat ini. Dalam berbagai kesempatan sosialisasi empat pilar bernegara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), wacana menghidupkan kembali GBHN sebagai pedoman perencanaan pembangunan nasional menjadi salah satu materinya. Hal tersebut tidak terlepas dari Rekomendasi Nomor 2 Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI Masa Jabatan 2009-2014, yang menyebutkan ”Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara” (Sadono, 2016: 2). Awal mula merebaknya isu menghidupkan kembali GBHN , dimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Sebelum Perubahan(asli) menjadi salah satu kewenangan MPR (Pasal 3) namun setelah dilakukannya Perubahan UUD NRI Tahun 1945, kewenangan tersebut dihapuskan.

Memperkuat Trilogi Pembangunan maka pemerintah pada masa Soeharto mengeluarkan 8 jalur pemerataan menurut Garis – garis Besar Haluan Negara (GBHN) yaitu (1) pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak,

khususnya pangan, sandang dan papan; (2) pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan keselamatan; (3) pemerataan pembagian pendapatan; (4) pemerataan kesempatan kerja; (5) pemerataan kesempatan berusaha; (6) pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita; (7) pemerataan penyebaran pembangunan di wilayah tanah air; dan (8) pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. (Gilarso, 2004)

Mengalokasikan dana desa agar rencana pembangunan dan pertumbuhan masyarakat semakin pesat. Dana desa bermanfaat untuk desa itu sendiri dan dampak dari pemberian dan penyaluran dana desa dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkat, perekonomian desa yang maju, mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek dalam pembangunan.

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi desa.
- c) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Realisasi Dana Desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pada pemberian dana desa di tahun 2015, sangat memberikan manfaat dan masyarakat dapat merasakan dampaknya secara langsung, masyarakat merasakan berbagai dampak positif, salah satunya adalah membantu masyarakat miskin di desa tersebut, dan mengatasi masalah ketimpangan dalam desa tersebut.

Manfaat pemberian dana desa ini sangat dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa berbagai aspek ekonomi menjadi terkendali dan terpenuhi. Pembangunan di desa tertinggal, dapat diarahkan agar mengurangi berbagai ketimpangan yang ada di desa. Bahkan realitas ini juga terjadi pada tahun 2018 pada era kepemimpinan Presiden Jokowi, misalnya dengan sikap pemerintah melakukan peningkatan alokasi dana kepada desa, bertujuan untuk meningkatkan distribusi yang terdapat di desa. Berbagai permasalahan yang ada di desa sedikit demi sedikit banyak yang teratasi, penyaluran dana yang dilakukan juga merata dan adil.

Peningkatan dana yang diberikan desa, juga perlu disiapkan dan dikelola oleh SDM yang baik. Sehingga dalam beberapa hal yang dilakukan desa selain menggunakan dana untuk pembangunan desa, tetapi juga melaksanakan pembinaan, bimbingan serta pendampingan, dan pemantauan yang lebih tertata dan saling berhubungan, disisi lain dari manfaat yang diberikan juga dibutuhkan penguatan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan program yang menjadi prioritas pembangunan desa dari tingkat pemerintah pusat, daerah, kecamatan, hingga desa itu sendiri, oleh karena itulah di setiap desa di dalam bentuk negara pastinya memiliki berbagai karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik tersebut bisa menjadi salah satu pertimbangan yang digunakan pemerintah dalam menyalurkan dana, Contoh saja desa tertinggal yang mana karakteristiknya adalah disana infrastruktur tersedia dengan sangat sedikit dan minim, oleh karena itu dana pemberian desa tersebut dianjurkan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan fasilitas publik akan semakin baik dari sebelumnya, selain itu untuk desa yang masyarakatnya sudah berkembang dengan baik, maka penyaluran dan pengalokasian dana tersebut lebih diarahkan untuk sistem pemberdayaan serta pengembangan perekonomian yang ada di desa tersebut.

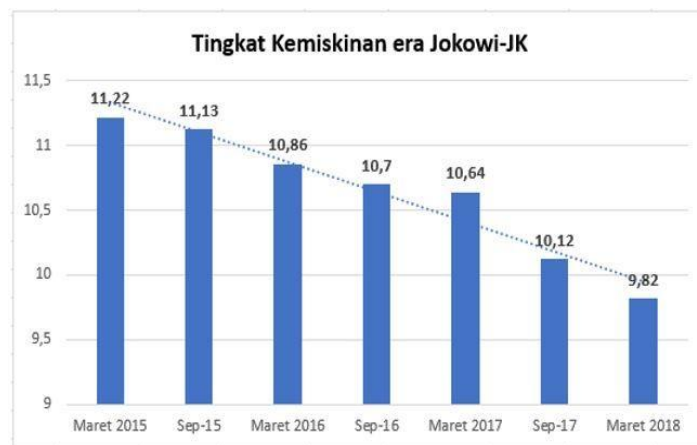
Kemiskinan di Negara sedang berkembang menjadi masalah yang sangat rumit diselesaikan meskipun kebanyakan Negara-negara ini sudah berhasil melaksanakan pembangunan ekonominya dengan tingkat pertumbuhan produksi dan pendapatan nasional yang tinggi, namun pada saat yang bersamaan telah terjadi peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok kaya dan kelompok miskin sehingga kemiskinan relatif semakin meningkat terutama di

wilayah pedesaan, sedangkan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dihadapkan pada masalah kemiskinan yang tidak bisa diabaikan. Menurut Badan Pusat Statistik (2014), Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin setiap tahunnya, namun masih terdapat sekitar 29,13 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2012. Kondisi kemiskinan juga dapat dilihat dari indeks kedalaman, indeks keparahan dan gini ratio.

Masalah kemiskinan terus menjadi masalah besar sepanjang sejarah Indonesia sebagai sebuah negara dalam negara yang salahurus tidak ada persoalan yang lebih besar selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak – anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota dan yang lebih parah kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan sandang dan papan secara terbatas.

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang tentu saja memiliki cita-cita dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengangkat taraf hidup masyarakat (UUD 45 alenia IV), maka pembangunan ekonomi harus ditingkatkan dan dilaksanakan secara maksimal. Strategi pembangunan yang dikembangkan bangsa Indonesia selama ini adalah bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang dianggap tinggi tersebut ternyata tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan pada semua golongan masyarakat. Sehingga terjadi *trade-off* antara pertumbuhan dan pemerataan, dalam atmosfer strategi ini memunculkan budaya konglomerasi yang

diharapkan akan menghasilkan *trickle down effect* kepada lapisan ekonomi di bawahnya. Model seperti ini mendasarkan diri pada pembangunan industri secara besar-besaran. Permasalahan yang timbul adalah tidak berjalannya mekanisme *trickle down effect*, dimana mekanisme tersebut sebenarnya sangat diyakini akan terbentuk sejalan dengan meningkatnya akumulasi kapital dan perkembangan institusi ekonomi yang mampu menyebarkan kesejahteraan yang merata. Namun demikian yang terjadi justru sebaliknya yaitu tetesan dorongan atau pemerataan ke bawah tidak terjadi mungkin sejak awal aturan dari pemerintah tidak jelas dan juga egoistik konglomerasi akhirnya yang terjadi adalah ketidak seimbangan pembagian pendapatan dari pembangunan itu sendiri.



Gambar 1.3 Tingkat Kemiskinan 2015- 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik 2015-2018

Berdasarkan gambar diatas bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia sempat naik menjadi 11,22% pada bulan Maret 2015, di era awal kepemimpinannya, didorong oleh kenaikan harga premium sebesar Rp. 2.000/liter dan harga solar sebesar Rp. 2.000/liter, namun setelah periode tersebut tingkat kemiskinan menurun secara berkelanjutan dari tahun ketahun, hingga menyentuh angka sebesar 9,82% pada periode Maret 2018 Penurunan tingkat kemiskinan era

Jokowo-JK menunjukkan bahwa keberhasilan program pembangunan di Indonesia. Adapun faktor penyebab penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia karena tingkat inflasi menurun, rata-rata pengeluaran per kapita/bulan untuk rumah tangga yang berada di 40% lapisan terbawah selama periode September 2017-Maret 2018 tumbuh sebesar 3,06%, bantuan sosial tunai dari pemerintah tumbuh 87,6% pada triwulan I-2018, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan I-2017 sebesar 3,39%, dan program beras sejahtera (Rastra) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan dan ketidakberdayaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, kurangnya air bersih, perumahan yang kurang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik dan tingkat pendidikan yang rendah. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan. Masyarakat miskin lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi

Kota Medan yang merupakan ibu kota Propinsi Sumatera Utara termasuk salah satu kota yang mempunyai persentase penduduk miskin yang relatif besar

karena jumlahnya mencapai 212.300 jiwa atau sekitar 10,05 % dari jumlah penduduk Kota Medan pada tahun 2010. Besarnya jumlah penduduk miskin tersebut berpotensi menciptakan permasalahan sosial yang rumit, seperti menurunnya kualitas sumber daya manusia, munculnya ketimpangan dan kecemburuan sosial, terganggunya stabilitas sosial politik, meningkatnya angka kriminalitas dan dampak-dampak lainnya. Jika kondisi tersebut berlangsung terus menerus, maka pada gilirannya dapat menghambat perkembangan ekonomi Kota Medan sehingga menyulitkan terwujudnya Kota Medan yang bermartabat, sejahtera dan berkeadilan. Melihat kondisi jumlah penduduk miskin di Kota Medan yang relatif masih besar, maka berbagai program dan kegiatan terus dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk menekan jumlah kemiskinan. Namun program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tanpa mengetahui akar penyebab kemiskinan tersebut, maka kebijakan tersebut kurang efektif dan tepat pada sasaran, oleh karena itu salah satu upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui kajian faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di Kota Medan ditinjau dari aspek ekonomi. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat diformulasikan sebuah model pengentasan kemiskinan melalui pendekatan

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara Dan Kabupaten/Kota
Tahun 2014- 2017

Kabupaten Kota	2014	2015	2016	2017
Sumatera Utara	1360.60	1463.66	1455.95	1453.87
Nias	22.21	24.53	24.11	24.88
Mandailing Natal	39.68	47.79	47.67	48.3
Tapanuli Selatan	29.38	31.20	30.84	29.48
Tapanuli Tengah	49.86	52.20	51.77	53.05
Tapanuli Utara	32.23	33.37	33.20	33.75
Toba Samosir	16.51	18.31	18.20	18.49
Labuhan Batu	37.35	41.63	41.94	42.35
Asahan	76.97	85.16	84.35	83.67
Simalungun	86.25	92.89	92.19	91.35
Dairi	23.35	25.33	24.94	24.98
Karo	35.36	37.52	38.74	40.02
Deli Serdang	90.92	95.65	100.09	97.09
Langkat	100.63	114.19	115.79	114.41
Nias Selatan	54.46	58.97	57.75	57.95
Humbang Hasundutan	17.14	18.04	18.04	18.35
Pakpak Bharat	4.72	5.12	4.95	4.95
Samosir	16.27	17.64	18.01	18.43
Serdang Bedagai	54.48	58.30	58.17	56.93
Batu Bara	44.72	50.37	49.42	50.91
Padang Lawas Utara	23.86	27.67	27.88	27.98
Padang Lawas	20.34	22.38	22.80	24.42
Labuhanbatu Selatan	35.65	36.37	36.62	37.82
Labuanbatu Utara	37.30	39.59	38.81	40.24
Nias Utara	38.95	43.74	41.66	39.47
Nias Barat	23.76	25.41	24.16	23.33
Sibolga	10.57	11.64	11.54	11.91
Tanjungbalai	23.17	25.09	24.42	24.69
Pematangsiantar	25.43	25.83	24.88	25.35
Tebing Tinggi	17.20	18.80	18.52	19.06
Medan	200.32	207.50	206.87	204.22
Binjai	16.72	18.60	17.80	18.23
Padangsidempuan	17.65	18.36	17.65	17.76
Gunungsitoli	37.20	34.47	32.17	30.08

Sumber: Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara pada tahun 2014 sebesar 1360.60 juta jiwa sedangkan pada tahun 2015 sebesar 1463.56 juta jiwa, maka

jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 102.96 juta jiwa. Kemudian pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebesar 1455.95 juta jiwa sedangkan pada tahun 2017 sebesar 1453.87 juta jiwa, maka jumlah penduduk miskin menurun sebesar 2.08 juta jiwa. Maka jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mengalami fluktuatif.

Kemudian pada kabupaten Deli Serdang jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 sebesar 90.92 juta jiwa sedangkan pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 95.65 juta jiwa, ini berarti jumlah penduduk miskin kabupaten Deli Serdang meningkat sebesar 4.73 juta jiwa. Kemudian pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 100.09 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2017 total penduduk miskin sebesar 97.09 juta jiwa. Ini berarti jumlah penduduk miskin di kabupaten Deli Serdang pada tahun 2016- 2017 mengalami penurunan sebesar 3 juta jiwa.

Kabupaten Deliserdang yang memiliki luas wilayah 2.479,72 km dengan jumlah penduduk 1.886.388 jiwa, memiliki 380 desa yang tersebar di 22 kecamatan. Karenanya, pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat bukanlah pekerjaan ringan. Menurut Bupati, dengan terbitnya UU Nomor 6/2014 tentang Desa, serta PP Nomor 43/2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6/2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, maka tugas penyelenggara pemerintahan, pembangunan pemberayaan masyarakat oleh pemerintah kabupaten dalam skala tertentu akan menjadi tugas kepala desa.

Kabupaten Deliserdang setiap desa akan mendapat dana transfer dari tiga sumber yakni dana desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp 105,94 miliar, alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 131,985 miliar dan dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp 30,527 miliar.

Tabel 1.2
Data Kemiskinan Kabupaten Deli Serdang

Kecamatan Subdistrict	Keluarga Sangat Miskin Poor Households	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
1 Gunung Meriah	-	220
2 S.T.M. Hulu	167	679
3 Sibolangit	242	1 087
4 Kuta Limbaru	738	2 630
5 Pancur Batu	1 015	3 617
6 Namo Rambe	356	1 344
7 Biru-Biru	444	1 796
8 S.T.M. Hilir	332	1 668
9 Bangun Purba	262	1 285
10 Galang	567	2 588
11 Tanjung Morawa	1 460	6 108
12 Patumbak	881	3 133
13 Deli Tua	368	1 451
14 Sunggal	752	3 755
15 Hampan Perak	3 929	11 169
16 Labuhan Deli	749	2 547
17 Percut Sei Tuan	1 856	8 131
18 Batang Kuis	431	1 759
19 Pantai Labu	1 403	3 698
20 Beringin	623	2 273
21 Lubuk Pakam	579	2 527
22 Pagar Merbau	968	2 830
Deli Serdang	18 122	66 295

Sumber: Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

Berdasarkan data kemiskinan diatas bahwa Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2015 sebesar 18.122 juta jiwa sedangkan pada tahun 2016 sebesar 66.295 juta jiwa, maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2015 sampai 2016 mengalami kenaikan sebesar 48.173 juta jiwa. Penduduk miskin terbanyak pada tahun 2015 dan 2016 adalah kecamatan Hampan Perak dan terbanyak kedua adalah kecamatan Percut

Sei Tuan. Sedangkan penduduk miskin yang paling sedikit terdapat di kecamatan Gunung Meriah.

Percut Sei Tuan merupakan salah satu dari 22 kecamatan Kabupaten Deli Serdang, Percut memiliki tingkat kemiskinan tertinggi ke 2 dari 22 kecamatan di kabupaten Deli Serdang salah satu karena berbatasan langsung dengan kota Medan dan merupakan desa yang memiliki karakter masyarakat kota. Ada pun di kecamatan percut sei tuan salah satunya adalah di desa tanjung selamat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Tanjung selamat merupakan sebuah desa yang berada di kecamatan Percut dimana mayoritas pekejaan di desa tanjung selamat adalah petani dan dimana sektor pertaniannya untuk maju dan efisien diharapkan mampu meningkatkan mutu, memperluas lapangan kerja, memperluas pasar, baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut maka upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah dengan penggunaan teknologi tepat guna, merubah perilaku petani dari subsistem menjadi petani modern, serta memperhitungkan efisiensi usahatani dan selalu berorientasi pasar. Pertanian merupakan sektor penting dan berpotensi besar dalam menunjang pembangunan di desa tanjung selama hasil tersebut dapat menjadi optimal karena didukung pihak-pihak terkait, terutama pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya, di sektor pertanian adalah salah satu sektor yang selama ini masih diandalkan oleh desa tersebut karena sektor pertanian mampu memberikan pemulihan dalam mengatasi krisis. Keadaan inilah yang menampakkan sektor pertanian sebagai salah satu sektor yang andal dan mempunyai potensi besar untuk berperan sebagai pemicu pemulihan ekonomi di desa tanjung selamat.

Masalah kemiskinan dihadapi di desa tajung selamat banyak dampak negatif dan penyebab masal kemiskinan di desa tanjung selamat ialah rendah pendidikan, rendah gizi terpenuhi, lalu pertumbuhan tidak jalan, mutu modal manusia tidak baik, cara berfikir menjadi kurang kreatif dan tidak produktif selain timbulnya banyak masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi di desa tersebut. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan kebutuhan hidup, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di desa tanjung selamat pembangunan nasional menjadi salah satu indikator menuju perubahan kearah yang lebih baik. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. Akan tetapi jumlah ini mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya hal ini disebabkan dengan adanya program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintahan berupa Program ini meliputi pengentasan kemiskinan melalui bantuan instan berupa kebutuhan dasar hidup, pelayanan kesehatan, pendidikan gratis, dan pemberdayaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang dimana jumlah Dana Desa (DD) pada tahun 2017 sebesar Rp 854.946.000 miliar, sedangkan alokasi dana desa (ADD) pada tahun 2017 sebesar Rp 443.241.000 miliar.

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di desa tanjung selamat pada tahun 2017 digunakan untuk bidang pembangunan pemerintahan desa sebesar 23%, di bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar 75% dan bidang pemberdayaan

masyarakat 2%. Terdapat berbagai hambatan dalam penyaluran dan penggunaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) dalam APBDes seperti rendahnya kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia pemerintahan Desa dan keaktifan dalam berpartisipasi masyarakat desa yang sangat minim, pada saat ini Dana Desa menghadapi kendala, kejadian tersebut merupakan hal yang wajar dikarenakan Dana Desa adalah suatu program baru yang memerlukan perbaikan dalam berproses dengan melihat keadaan di lapangan. Kendala rendahnya kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia pemerintah Daerah, khususnya untuk pemerintah Desa menyebabkan terlambatnya proses penyaluran Dana Desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang berkenaan dengan kebijakan Dana Desa terhadap kemiskinan dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan melihat apakah adanya kebijakan Dana Desa dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Untuk itu, penelitian ini berjudul **“Analisis Dampak Kebijakan Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka di dapat beberapa permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tidak efektifnya pemerataan pembangunan ekonomi menyebabkan ketimpangan di wilayah Indonesia.

2. Tidak optimalnya pembanguna desa menyebabkan ekonomi lokal tersedat sehingga tingkat kemiskinan di Sumatra Utara tahun 2014 – 2017 tidak mengalami penurunan yang berarti.
3. Sejak pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) infrastruktur jalan diProvinsi Sumatra Utara belum ada yang signifikan menyebabkan potensi besar Sumut masuk tertinggi.
4. Rendahnya kapabilitas dan kapasitas sumber manusia pemerintahan eproses penyaluran dana desa di Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan.
5. Rendahnya pendidikan, kurang gizi yang terpenuhi, lalu pertumbuhan tidak jalan dan mutu modal yang tidak baik, menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan du desa Tanjung Selamat berdampak negatif terhadap perekonomian desa.

1.3 Batasan dan Rumusan masalah

1.3.1 Batasan masalah

Ada banyak maqsqalah yang bisa di angkat dari penelitian ini, namun penulis perlu membatsai masalah yang lebih terperinci dan jelas agar pemecahannya terarah jadi penelitian ini hanya dibatasi pada masalah seberapa besar pengaruh kebijakan Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

1.3.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan Dana Desa dan jumlah Rumah tangga miskin di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ?

2. Bagaimana perkembangan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kualitas hidup Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang .

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Melakukan analisa secara deskriptif perkembangan Dana Desa dan jumlah Rumah tangga miskin di Kecamatan Percut Sei Tuan
2. Melakukan evaluasi Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kualitas hidup Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan dengan dunia di sektor keuangan negara dan pembangunan nasional maupun kalangan masyarakat umum. Manfaat yang dapat diambil diantaranya:

1.5.1 Manfaat Akademik

a. Bagi peneliti:

- (1) Sebagai bahan studi atau tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian menyangkut topik yang sama.
- (2) Sebagai tambahan literatur terhadap penelitian sebelumnya.

b. Bagi mahasiswa:

- (1) Melatih mahasiswa untuk dapat menguraikan dan membahas suatu permasalahan secara ilmiah, teoritis, dan sistematis.
- (2) Sebagai tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pembahasan yang terkait.

1.5.2 Manfaat Non-akademik

- a. Sebagai bahan masukan dalam penetapan kebijakan pemerintahan.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambahan pengetahuan bagi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi pada saat ini merupakan salah satu syarat mutlak apabila suatu wilayah ingin mengalami pertumbuhan ekonomi. Suatu wilayah dikatakan sejahtera apabila dilihat dari pertumbuhannya mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan wilayah yang lain, Pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya diikuti dengan terjadinya pemerataan.

Pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat dibidang ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktifitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kemakmuran (*income* per-kapita) dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses dimana pendapatan perkapita suatu negara meningkat selama kurun waktu panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang (Meier dikutip dalam Kuncoro, 2006:5).

Pembangunan ekonomi diperlukan faktor pendukung agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan pembangunan. Berdasarkan Jhingan (2012:338), salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi ialah pembentukan atau pengumpulan modal. Pembentukan modal meliputi modal

materil maupun modal manusia, ada berbagai pendapat bahwa dalam pembangunan ekonomi yang dibutuhkan hanya modal materil saja, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa modal manusia juga dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi, dengan adanya pembentukan modal diharapkan tujuan pokok pembangunan akan tercipta.

Tujuan pokok pembangunan ekonomi itu sendiri adalah untuk membangun peralatan modal dalam skala yang cukup untuk meningkatkan produktivitas dibidang pertanian, pertambangan, perkebunan dan industri (Jhingan, 2012:338), selain itu modal juga diperlukan untuk mendirikan sekolah, rumah sakit, jalan raya, jalan kereta api dan sebagainya. Untuk dapat meningkatkan kemajuan perekonomian, suatu negara harus memenuhi persyaratan dasar dalam melakukan pembangunan. Berdasar M.L Jhingan (2012:41), prasyarat-prasyarat dasar bagi pembangunan ekonomi diantaranya:

1. Atas dasar kekuatan sendiri, hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan materil harus muncul dari warga negara itu sendiri
2. Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar yang menyebabkan immobilitas faktor dan menghambat ekspansi sektoral dan pembangunan, sehingga diperlukan perbaikan dan penggantian lembaga sosio ekonomi.
3. Perubahan struktural, adanya peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri moderen, yang mencakup peralihan lembaga, sikap sosial, dan motivasi yang ada secara radikal.

4. Pembentukan modal, merupakan faktor penting dan strategis didalam proses pembangunan, namun penyediaan atau penciptaan modal akan menjadi sia-sia kalau tidak ada faktor lain yang menunjang pertumbuhan ekonomi.
5. Kriteria investasi yang tepat, merupakan tanggungjawab negara untuk melakukan investasi yang paling menguntungkan masyarakat, harus dikaji dengan mempertimbangkan keseluruhan kompleks dinamika perekonomian.
6. Persyaratan sosio budaya, wawasan sosio budaya masyarakat haruslah diubah jikalau pembangunan diharapkan dapat berjalan. Kenaikan pendapatan nasional tidak akan membawa kenaikan kesejahteraan sosial, jika kenaikan pendapatan itu kurang dibarengi dengan penyesuaian budaya.
7. Administrasi, kehadiran administrasi yang kuat, berwibawa dan tidak korup, merupakan sine qua non pembangunan ekonomi. Tanpa alat perlengkapan administratif yang baik dan efisien, rencana pembangunan publik maupun privat tidak akan dapat dilaksanakan secara sempurna Antara pendapatan pada masyarakatnya sehingga pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menjadi sangat penting bagi terciptanya kemakmuran suatu wilayah. Salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan bekerjasamanya pihak swasta dan pemerintah dalam bentuk investasi. Investasi pada suatu wilayah juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi pada wilayah tersebut sehingga nantinya investasi akan memacu pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dan bukan sebaliknya.

A. Teori Klasik

1. Adam smith

Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang dianggap paling terkemuka. Karyanya yang sangat terkenal, adalah sebuah buku yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* yang diterbitkan 1776, terutama menyangkut permasalahan pembangunan ekonomi. Walaupun ia tidak memaparkan teori pertumbuhan secara sistematis namun teori yang berkaitan dengan itu kemudian disusun oleh para ahli ekonomi.

2. David Ricardo

David Ricardo juga mengungkapkan pandangannya mengenai pembangunan ekonomi dengan cara yang tidak sistematis dalam bukunya *The Principles of Political Economy and Taxation*. Buku ini diterbitkan 1817. Edisi ketiga 1921 serta korespondensi Ricardo dengan beberapa ahli ekonomi lainlah yang menurut ide-ide Ricardo yang menjadi dasar pembentukan model pembangunan Ricardo. Sesungguhnya Ricardo tidak pernah mengajukan satu pun teori pembangunan. Menurut Schumpeter, ia hanya mendiskusikan teori distribusi. Oleh sebab itu analisa Ricardo merupakan analisa yang memutar.

Ricardo membangun teorinya tentang saling hubungan antara tiga kelompok dalam perekonomian, yaitu tuan tanah, kapitalis, dan buruh. Kepada mereka inilah keseluruhan hasil dibagi-bagikan. Sementara Ricardo sendiri menulis dalam pendahuluan bukunya, "Hasil bumi (hasil yang diperoleh dari permukaannya dengan menggunakan buruh secara terpadu, mekanisasi, dan modal) dibagi-bagikan kepada tiga kelas masyarakat yaitu pemilik tanah, pemilik stok kapital yang diperlukan bagi pengolahan tanah, dan para buruh yang mengerjakan." Keseluruhan pendapatan nasional dibagi-bagikan tiga kelompok tersebut masing-masing sebagai uang sewa, keuntungan dan upah (Jhingan, 2010)

3. Arthur Lewis

Teori pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi di antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan upah yang berlaku di sektor modern yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada. Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya akan terbagi menjadi dua yaitu:

a. Perekonomian Tradisional

Teori Lewis mengasumsikan bahwa di daerah pedesaan dengan perekonomian tradisionalnya mengalami surplus tenaga kerja. Surplus tersebut erat kaitannya dengan basis utama perekonomian yang diasumsikan berada di perekonomian tradisional adalah bahwa tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang bersifat subsisten pula, hal ini ditandai dengan nilai produk marginal (*marginal product*) dari tenaga kerja yang bernilai nol. Artinya fungsi produksi pada sektor pertanian telah sampai pada tingkat berlakunya hukum law of diminishing return. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan *input* variabel tenaga kerja yang terlalu besar, dalam perekonomian semacam ini pangsa semua pekerjaan terhadap *output* yang dihasilkan adalah sama. Dengan demikian, nilai upah riil ditentukan oleh nilai rata-rata produk marginal dan bukan oleh produk marginal dari tenaga kerja itu sendiri.

b. Perekonomian Industri

Perekonomian ini terletak di perkotaan, di mana sektor yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri dari perekonomian ini adalah tingkat produktifitas yang tinggi dari *input* yang digunakan, termasuk tenaga kerja, hal ini menunjukkan bahwa nilai produk marginal terutama tenaga kerja bernilai positif, dengan demikian perekonomian di perkotaan akan merupakan daerah tujuan bagi para pekerja yang berasal dari pedesaan, karena nilai produk marginal dari tenaga kerja yang positif menunjukkan bahwa fungsi produksi belum berada pada tingkat optimal yang mungkin dicapai.

4. Hollis B. Chenery

Analisis teori *Pattern of Development* memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonominya. Penelitian yang dilakukan Hollis B. Chenery tentang transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri. Peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita yang terjadi di suatu negara, berhubungan erat dengan akumulasi capital dan peningkatan sumberdaya manusia (*human capital*). (Todaro & Smith, 2011)

5. Rei-Ranis

Teori pembangunan ekonomi Rei-Ranis berkenaan dengan suatu negara terbelakang yang kelebihan buruh disertai perekonomian yang miskin sumberdaya, dimana sebagian besar penduduk bergerak di bidang pertanian di tengah pengangguran hebat dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ekonomi pertaniannya berhenti orang bergerak di lapangan pertanian tradisional. Bidang-bidang nonpertanian memang ada, tetapi begitu banyak mempergunakan modal, disitu juga ada sektor industri yang aktif dan dinamis. Pembangunan terdiri dari pengalokasian kembali surplus tenaga kerja di bidang pertanian, yang sumbangannya terhadap *output* adalah nol atau dapat diabaikan, ke sektor industri di mana mereka menjadi produktif dengan upah yang sama dengan upah di bidang pertanian.

B. Teori Keynes

Ekonomi Keynesian merupakan nama suatu teori ekonomi yang diambil dari John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris yang hidup antara tahun 1883 sampai 1946. Beliau dikenal sebagai orang pertama yang mampu menjelaskan secara sederhana penyebab dari *Great Depression*. Teori ekonominya berdasarkan atas hipotesis siklus arus uang, yang mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja (konsumsi) dalam suatu perekonomian, akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan mendorong lebih meningkatnya lagi belanja dan pendapatan. Teori Keynes ini menelurkan banyak intervensi kebijakan ekonomi pada era terjadinya *Great Depression*.

Pada Teori Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian

yang sama. Sehingga apabila seorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus ini terus berlanjut dan membuat perekonomian dapat berjalan secara normal. Ketika *Great Depression* melanda, masyarakat secara alami bereaksi dengan menahan belanja dan cenderung menimbun uangnya. Hal ini berdasarkan Teori Keynes akan mengakibatkan berhentinya siklus perputaran uang dan selanjutnya membuat perekonomian lumpuh.

Solusi Keynes untuk menerobos hambatan perekonomian ini adalah dengan campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan suplai uang atau dengan melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sendiri. Selama terjadi *Great Depression*, hal ini bagaimanapun merupakan solusi yang tidak populer. Namun demikian, belanja pertahanan pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt membantu pulihnya perekonomian Amerika Serikat.

Aliran Ekonomi Keynesian, menganjurkan supaya sektor publik ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum, dimana pendapat ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi yang populer saat itu – *laissez-faire capitalism* (teori kapitalisme). Kapitalisme murni merupakan teori yang menentang campur tangan sektor publik dan pemerintah dalam perekonomian. Teori ini percaya bahwa pasar yang bebas campur tangan akan mencapai keseimbangannya sendiri. Keynes berpendapat bahwa dalam perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk mengelola perekonomian, karena pada umumnya seperti yang dikatakan oleh

pemikir beraliran sosialis, pihak swasta bertujuan utama untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan apabila hal itu dibiarkan maka perekonomian akan menjadi tidak kondusif secara keseluruhan. Oleh karena itu, agar kegiatan swasta dapat terjamin berada pada jalur yang tepat, maka harus ada satu otoritas yang mengendalikan dan mengatur perekonomian tersebut. Otoritas tersebut tentu saja adalah pemerintah.

Teori Keynes mengemukakan kebijakan pemerintah yang terlalu mendorong tabungan dan tidak mendorong konsumsi. Keynes juga mendukung pendistribusian kekayaan secara terkendali ketika diperlukan. Teori Keynes kemudian menyimpulkan bahwa ada alasan pragmatis untuk pendistribusian kemakmuran: jika segment masyarakat yang lebih miskin diberikan sejumlah uang, mereka akan cenderung membelanjakannya daripada menyimpannya; yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi. Ide pokok dari teori Keynes ini adalah “Peranan Pemerintah” yang tadinya diharamkan dalam Teori Ekonomi Klasik. John Meynard Keynes menjelaskan teori ekonominya dalam buku karangannya berjudul “*The General Theory Of Employment, Interest And Money*”. Pembuatan model ini diserahkan kepada para pengikutnya seperti Harrold Domar, Joan Robinson dan lainnya yang sepenuhnya memanfaatkan peralatan Keynes untuk membuat model-model pertumbuhan ekonomi. Teori Keynes tidak dapat diterapkan pada setiap tatanan sosio-ekonomi. Ia hanya berlaku pada ekonomi kapitalis demokratis yang telah maju. Sebagaimana tulis Schumpeter, “ajaran praktis Keynes merupakan bibit yang tidak dapat dipindahkan ke tanah seberang, ia akan mati di sana dan bahkan menjadi beracun sebelum mati. Tetapi ditanah Inggris, tanaman ini tumbuh dengan subur dan

menjanjikan buah dan keteduhan. Begitu juga dengan saran lain yang pernah dikemukakan Keynes. (Jhingan, M.L, 2010)

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut pandangan ekonom klasik mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang dan modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, (4) tingkat teknologi yang digunakan (Kuncoro,2004). Menurut Kuznet pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya.

Menurut Todaro (2003), Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor,yaitu :

1. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja Pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja yang notabnya merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemampuan pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi seberapa besar perekonomian dapat menyerap angkatan kerja yang bekerja produktif.
2. Akumulasi Modal Akumulasi modal merupakan gabungan dari investasi baru yang di dalamnya mencakup lahan, peralatan fiskal dan sumber daya manusia yang digabung dengan pendapatan sekarang untuk dipergunakan memperbesar output pada masa datang.
3. Kemajuan Teknologi Kemajuan teknologi menurut para ekonom merupakan faktor terpenting dalam terjadinya pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan

karena kemajuan teknologi memberikan dampak besar karena dapat memberikan cara-cara baru dan menyempurnakan cara lama dalam melakukan suatu pekerjaan.

Menurut Sadono (2000), alat untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri. Perekonomian wilayah akan mengalami kenaikan dari tahun ketahun dikarenakan adanya penambahan pada faktor produksi. Selain faktor produksi, jumlah angkatan kerja yang bekerja juga akan meningkat dari tahun ke tahun sehingga apabila dimanfaatkan dengan maksimal maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa alat pengukur dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. Produk Domestik Bruto (PDB) Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto apabila ditingkat nasional adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar.
2. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Produk domestik bruto per kapita dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan yang lebih baik dalam mencerminkan kesejahteraan penduduk dalam skala daerah.

Model pertumbuhan ekonomi neoklasik yang dikemukakan oleh Solow menyatakan bahwa persediaan modal dan angkatan yang bekerja dan asumsi bahwa produksi memiliki pengembalian konstan merupakan hal-hal yang mempengaruhi besarnya *output*. Model pertumbuhan Solow juga dirancang untuk mengetahui apakah tingkat tabungan, stok modal, tingkat populasi dan kemajuan teknologi mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dilihat menggunakan PDRB per kapita sehingga diketahui apakah kesejahteraan masyarakat sudah tercapai atau belum.

Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dilihat menggunakan PDRB per kapita sehingga diketahui apakah kesejahteraan masyarakat sudah tercapai atau belum, ada beberapa model pertumbuhan ekonomi yang berkembang hingga saat ini yaitu : Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik, Teori Pertumbuhan Neo Klasik, Model Pertumbuhan Interegional, Teori Pertumbuhan Harrod-Domar dan Teori Pertumbuhan Kuznet.

A. Teori Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi klasik merupakan salah satu dasar dari teori pertumbuhan yang dipakai baik dari dulu sampai sekarang. Teori pertumbuhan ekonomi klasik dikemukakan oleh tokoh-tokoh ekonomi seperti Adam Smith dan David Ricardo. Menurut Smith (dalam Arsyad,1999) membedakan dua aspek utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu : Pertumbuhan *output* total dan pertumbuhan penduduk. Pada pertumbuhan output total sistem produksi suatu Negara di bagi menjadi tiga yaitu :

1. Sumber Daya Alam yang Tersedia

Apabila sumber daya alam belum dipergunakan secara maksimal maka jumlah penduduk dan stok modal merupakan pemegang peranan dalam pertumbuhan *output*. Sebaliknya pertumbuhan *output* akan terhenti apabila penggunaan sumber daya alam sudah maksimal.

2. Sumber Daya Insani

Jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan angkatan kerja yang bekerja dari masyarakat.

3. Stok Barang Modal

Jumlah dan tingkat pertumbuhan *output* tergantung pada laju pertumbuhan stok modal.

B. Teori Keynes

Perapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkannya, demikian sebaliknya. Volume pekerjaan tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan permintaan investasi. Permintaan konsumsi tergantung pada kecenderungan untuk konsumsi. Yang disebut terakhir ini tidak meningkat secepat kenaikan pendapatan. Jurang antara pendapatan dan konsumsi dapat dijembatani oleh investasi. Jika volume investasi yang diperlukan tak terpenuhi maka harga permintaan agregat akan turun, lebih rendah daripada harga penawaran agregat. Akibatnya, pendapatan dan pekerjaan akan turun sampai

jurang tersebut teijembatani. Jadi perbedaan antara pekerjaan dan pendapatan ini sebagian besar akan tergantung pada investasi. Volume investasi tergantung pada efisiensi marginal dari modal dan suku bunga. Efisiensi marginal dan modal merupakan tingkat hasil yang diharapkan dari aktiva modal baru. Bilamana harapan laba tinggi, pengusaha menginvestasi lebih besar. Suku bunga, yang merupakan faktor lainnya dari investasi, tergantung pada kuantitas. Sekarang investasi dapat dinaikkan melalui peningkatan efisiensi marginal dari modal atau penurunan suku bunga. Walaupun kenaikan investasi biasanya menyebabkan kenaikan pekerjaan, ini bisa tidak terjadi jika pada waktu yang sama kecenderungan untuk mengkonsumsi turun. Sebaliknya kecenderungan mengkonsumsi dapat mengakibatkan kenaikan pada pekerjaan kenaikan pada investasi. Kenaikan investasi menyebabkan naiknya pendapatan. Dan karena pendapatan meningkat, muncul permintaan yang lebih banyak atas barang konsumsi, yang pada gilirannya menyebabkan kenaikan berikutnya pada pendapatan dan pekerjaan. Proses ini cenderung menggumpal (kumulatif). Akibatnya kenaikan tertentu pada investasi menyebabkan kenaikan yang berlipat pada pendapatan melalui kecenderungan mengkonsumsi. (Jhingan, 2010) Hubungan antara kenaikan investasi dan pendapatan ini oleh Keynes disebut multiplier K. Pengali (multiplier) ini memperlihatkan hubungan yang tepat, berkat adanya kecenderungan mengkonsumsi tersebut, antara pekerjaan agregat dan pendapatan agregat dengan tingkat investasi. Ini berarti, bila investasi agregat naik, pendapatan akan meningkat, yang besarnya adalah K kali kenaikan investasi tersebut. Rumusnya ialah $\Delta Y = K\Delta I$, dan $1-1/K$ mewakili kecenderungan marginal mengkonsumsi. Jadi pengali $K = 1/1-MPC$. Karena kecenderungan marginal

berkonsumsi turun, berkat adanya kenaikan pendapatan, maka diperlukan suntikan investasi dengan dosis besar guna memperoleh tingkat pendapatan dan pekerjaan yang lebih tinggi dalam perekonomian. Inilah secara singkat teori Keynes mengenai pekerjaan. (Jhingan, 2010) Keynes tidak membangun suatu model pembangunan ekonomi yang sistematis dalam “*General Theory*” nya. Pembuatan model ini diserahkan kepada para pengikutnya seperti Harrod, Domar, Joan Robinson dan lainnya yang sepenuhnya memanfaatkan peralatan Keynes untuk membuat modelmodel pertumbuhan ekonomi. Hanya dalam karangannya yang berjudul “*Economic Possibilities for Our Grand Children*” Keynes mengemukakan serentetan syarat pokok kemajuan ekonomi, yaitu (i) kemampuan kita mengendalikan penduduk; (ii) kebulatan tekad menghindari perang dan perselisihan sipil; (iii) kemauan untuk mempercayai ilmu pengetahuan, mempedomani hal-hal yang benar-benar sesuai dengan ilmu pengetahuan; dan (iv) tingkat akumulasi yang ditentukan oleh margin antara produksi dan konsumsi. Sejauh menyangkut kekhawatiran akan masa depan kapitalisme, Keynes bersifat optimis Keynes menganggap kapitalisme sebagai suatu mekanisme yang mempunyai kekenyalan dan daya adaptasi yang besar dalam membentuk dirinya sendiri menurut keadaan. Keynes membangun teori kebangkrutan kapitalisnya (stagnasi jangka panjang) berdasarkan overproduksi umum, konsumsi rendah yang kronis dan merosotnya efisiensi marginal modal di masa depan. (Jhingan, 2010)

C. Teori Neo-Klasik

Teori pertumbuhan neo klasik dikembangkan oleh dua orang ekonom yaitu : Robert Solow dan Trevor Swan. Teori neo-klasik berpendapat bahwa

pertumbuhan ekonomi bersumber pada penambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Teori pertumbuhan ini juga menekankan bahwa perkembangan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi merupakan faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi (Sukirno,2005).

Teori neo-klasik juga membagi tiga jenis input yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. Pengaruh modal dalam pertumbuhan ekonomi
2. Pengaruh teknologi dalam pertumbuhan ekonomi
3. Pengaruh angkatan kerja yang bekerja dalam pertumbuhan ekonomi

Teori neo-klasik memiliki pandangan dari sudut yang berbeda dari teori klasik yaitu dari segi penawaran.

1. Model Pertumbuhan *Interregional*

Model pertumbuhan *interregional* menambahkan faktor-faktor yang bersifat eksogen yang berarti tidak terikat kepada kondisi internal perekonomian wilayah. Model ini hanya membahas satu daerah dan tidak memperhatikan dampak dari daerah lain, maka model ini disebut dengan model *interregional*. Teori ini sebenarnya merupakan perluasan dari teori basis ekspor sehingga diasumsikan selain ekspor, pengeluaran pemerintah dan investasi bersifat eksogen dan saling terkait dengan satu sistem dari daerah lain. Teori neo-klasik berpendapat faktor teknologi ditentukan secara eksogen dari model. Kekurangan dalam keberadaan

teknologi ini yang menyebabkan munculnya teori baru yaitu teori pertumbuhan endogen.

1. Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar merupakan penyempurnaan dari analisis Keynes yang dianggap kurang lengkap. Dalam teori ini Harrod-Domar menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Teori ini ingin menunjukkan syarat yang dibutuhkan supaya perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan baik (Arsyad,1999). Harrod-Domar (dalam Sadono,2005), menyatakan supaya seluruh barang modal yang tersedia dapat digunakan sepenuhnya, permintaan agregat harus bertambah sebanyak kenaikan kapasitas barang modal yang terwujud sebagai akibat dari investasi masa lalu. Jadi untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang baik maka nilai investasi dari tahun ketahun harus selalu naik.

2. Kuznet

Pertumbuhan ekonomi Kuznet menunjukkan adanya kemampuan jangka panjang dari pertumbuhan ekonomi suatu negara untuk menyediakan barang- 30 barang ekonomi kepada rakyatnya. Hal ini dapat dicapai apabila ada kemajuan dibidang teknologi, kelembagaan dan penyesuaian idiologi. Teori pertumbuhan Kuznet dalam analisisnya menambahkan enam karakteristik pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu :

1. Tingginya tingkat pendapatan
2. Tingginya produktifitas tenaga kerja

3. Tingginya faktor transformasi struktur ekonomi
4. Tingginya faktor transformasi sosial idiologi
5. Kemampuan perekonomian untuk melakukan perluasan pasar
6. Adanya kesadaran, bahwa pertumbuhan ekonomi sifatnya terbatas

2.1.3. Keuangan Negara

A. Teori Pengeluaran Pemerintah

Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan atas dua bagian yaitu teori makro dan mikro. Dalam teori ekonomi makro, ada dua pandangan yang berbeda berkenaan dengan pengeluaran pemerintah dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional. Kedua pandangan yang berbeda mengenai pengeluaran pemerintah dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi (pendapatan nasional) dalam kajian teori ekonomi makro dapat dijelaskan sebagai berikut (Manik & Hidayat, 2010):

1. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan

partumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi.

Musgrave memiliki pendapat bahwa investasi swasta dalam presentase terhadap GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam presentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Teori Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam presentase terhadap GDP yang didasarkan pula pengamatan di negara-negara Eropa, U.S dan Jepang. Hukum wagner berisi apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat. Pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat akan memacu adanya kegagalan pasar dan eksternalitas. Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Hukum wagner ditunjukkan pada kurva di bawah ini :

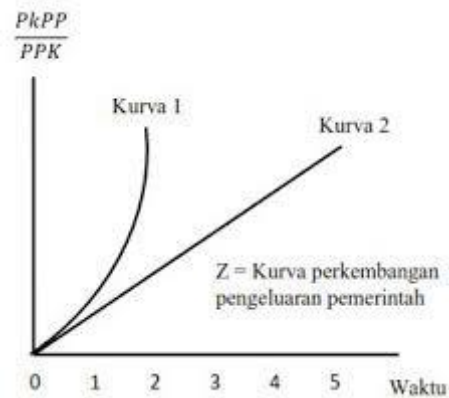
$$\frac{PPkP}{PPK1} < \frac{PPkP}{PPK1} < \dots < \frac{PPkP}{PPK1} \dots \dots \dots (2-1)$$

Keterangan :

PPkP : Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1, 2,...,n : jangka waktu (tahun)



Gambar 2.1 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

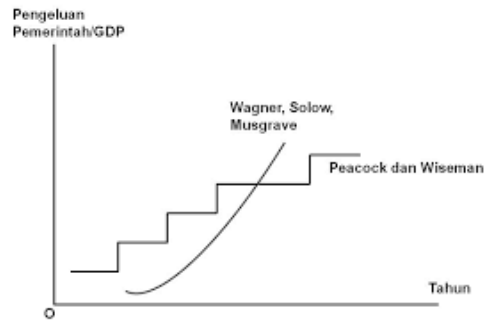
Sumber: Mangkoesebroto, 2001

3) Teori Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah. Pemerintah lebih cenderung menaikkan pajak untuk membiayai anggarannya, di sisi lain masyarakat memiliki keengganan untuk membayar pajak, terlebih lagi jika pajak terus dinaikkan. Mempertimbangkan teori pemungutan suara dimana masyarakat memiliki batas toleransi pembayaran pajak. Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin 32 meningkat, oleh karena itu dalam keadaan normal meningkatnya GDP akan menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Akibat

adanya keadaan tertentu yang mengharuskan pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya, maka pemerintah memanfaatkan pajak sebagai alternatif untuk peningkatan penerimaan negara. Jika tarif pajak dinaikkan maka pengeluaran investasi dan konsumsi masyarakat menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (*displacement effect*) yaitu adanya suatu gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh beberapa teori yaitu model pembangunan, hukum Wagner, teori Peacock dan Wiseman. Model pembangunan menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sebagai investasi pemerintah dapat meningkatkan pembangunan ekonomi baik dalam tahap awal, menengah maupun akhir. Hukum Wagner berisi teori bahwa pendapatan per kapita yang semakin meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah meningkat. Selain itu, Teori Peacock dan Wiseman juga mengungkapkan bahwa dalam keadaan normal, meningkatnya GDP akan menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah yang semakin besar. Dari beberapa teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen yang dapat mempengaruhi GDP serta pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, seperti kurva di bawah, tetapi berbentuk seperti tangga.



Gambar 2.2 Kurva Wagner, Solow, dan Musgrave

Sumber: *Mangkoesebroto, 2001*

Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Sollow, dan Musgrave digambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya.

Sedangkan tujuan dari teori mikronya, perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Penentuan Permintaan

$$U^i = f(X, G) \dots \dots \dots (2-1)$$

Dimana :

$$U_i = f(G, X)$$

G = vektor dari barang publik

X = vektor barang swasta

i = individu; = 1, ..., m

U = fungsi utilitas

Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta. Akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran (*budget constraints*). Misalkan seorang individu (i) membutuhkan barang publik (K) sebanyak G_k . Untuk menghasilkan i barang K sebanyak G_k , pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjagaan keamanan.

b. Penentuan tingkat output

$$U_p = g(X, G, S) \dots \dots \dots (2-2)$$

Keterangan :

U_p = fungsi utilitas

S = keuntungan yang diperoleh politisi

G = vektor barang publik

X = vektor barang swasta

Kita asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat diwakili seorang pemilih:

$$\text{Max } U_i = f(X, G) \dots \dots \dots (2-3)$$

Dengan pemuasan dibatasi kendala anggaran sehingga rumusnya:

$$P_x X + t B < M_i \dots \dots \dots (2-4)$$

Dimana :

P = vektor harga barang swasta

X = vektor barang swasta

B_i = basis pajak individu

$1 M_i$ = total pendapatan individu

$1 T$ = tariff pajak

Kurva permintaan dari pemilik yang mewakili masyarakat ditentukan oleh 2 proses, yaitu dengan mengasumsikan pemilik tidak punya kemampuan mempengaruhi tarif pajak, sehingga dia bertindak sebagai pengambil harga (*Price Taker*). Atau, asumsikan kedua pemilik tidak bisa menentukan jumlah barang publik, sehingga Ia bertindak sebagai pengambil output (*Output Taker*).

B. Teori Penerimaan Pemerintah

Berdasarkan undang-undang Republik Inonesia No.17 Tahun 2003, Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan negara berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dalam negeri dan luar negeri.

Pada umumnya penerimaan pemerintah dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak misalnya adalah penerimaan pemerintah, yang berasal dari pinjaman pemerintah baik pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri, penerimaan dari badan saham milik pemerintah, penerimaan lelang dan sebagainya (Guritno, 1994)

Dasar hukum dari sumber penerimaan negara diatur dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara dalam hal ini pemerintah diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Artinya negara harus dapat memanfaatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya menjadi sumber penerimaan negara.

1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor. Hingga saat ini struktur pendapatan negara masih di dominasi oleh penerimaan perpajakan, terutama penerimaan pajak dalam negeri dari sektor nonmigas.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan

negara bukan pajak lainnya. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, PNBPN memiliki peran yang cukup penting dalam menopang kebutuhan pendanaan anggaran dalam APBN walaupun sangat rentan terhadap perkembangan berbagai faktor eksternal. PNBPN juga dipengaruhi oleh perubahan indikator ekonomi makro, terutama nilai tukar dan harga minyak mentah di pasar internasional. Hal ini terutama karena struktur PNBPN masih didominasi oleh penerimaan sumber daya alam, khususnya yang berasal dari penerimaan minyak bumi gas alam (migas), yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah, harga minyak mentah, dan tingkat lifting minyak.

3. Penerimaan Hibah

Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri. Penerimaan hibah yang dicatat di dalam APBN merupakan sumbangan atau donasi dari negara-negara asing, lembaga/badan nasional, serta perorangan yang tidak ada kewajiban untuk membayar kembali. Perkembangan penerimaan negara yang berasal dari hibah ini dalam setiap tahun anggaran bergantung pada komitmen dan kesediaan negara atau lembaga donatur dalam memberikan donasi kepada Pemerintah Indonesia.

2.2 Kebijakan (Regulasi)

A. Desentralisasi Fiskal

Penerapan otonomi dan desentralisasi fiskal ditandai dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 pada 1 Januari 2001. Dalam

perjalanannya kedua undang-undang tersebut menimbulkan beberapa permasalahan yang kemudian diperbaiki oleh pemerintah melalui revisi undang-undang tersebut menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 18 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diberlakukan pada bulan desember 2004 (RPJMN 2004-2009)

Dalam UU No. 32 Tahun 2004, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah, oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Ebel dan Yilmaz (2002) ada tiga bentuk/variasi desentralisasi, dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan di daerah, yaitu:

1. *Decontretation*

Merupakan pelimpahan kewewenangan dari agen-agen pemerintah pusat yang ada di ibukota negara, pada agen-agen di daerah.

2. *Delegation*

Merupakan penunjukan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan tanggung jawab pada pemerintah pusat

3. *Devolution*

Merupakan penyerahan urusan fungsi-fungsi pemerintah pusat, pada pemerintah daerah, dimana daerah juga diberi kewenangan dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran daerahnya.

Mengingat prinsip *money follow function* dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan bentuk dari 19 desentralisasi yang ketiga (*devolution*)

Tujuan penerapan adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, dimana pemerintah dapat bekerja dengan lebih baik (efisien) dalam kondisi tersebut (M. Ryaas Rasyid, 2005). Menurut prawirosetoto (2002), desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan kewewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (*public goods/public services*).

Ada dua keuntungan yang dapat dicapai dari penerapan desentralisasi fiskal (Ebel dan Yilmaz, 2002), antara lain:

1. Efisiensi dan alokasi sumber-sumber ekonomi 20 Desentralisasi akan meningkatkan efisiensi karena pemerintah daerah mampu memperoleh informasi yang lebih baik (dibandingkan dengan pemerintah pusat) mengenai kebutuhan rakyat yang ada di daerahnya. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah daerah lebih mampu merefleksikan kebutuhan/pilihan masyarakat di wilayah tersebut dibandingkan bila dilakukan oleh pemerintah pusat.
2. Persaingan antara pemerintah daerah Penyediaan barang publik yang dibiayai oleh pajak daerah akan mengakibatkan pemerintah daerah berkompetisi dalam menyediakan fasilitas publik yang lebih baik. Karena

dalam sistem desentralisasi fiskal, warga negara menggunakan metode “*vote by feet*” dalam menentukan barang publik di wilayah mana, yang akan dimanfaatkan

Untuk mengukur desentralisasi fiskal di suatu wilayah, terdapat dua variabel umum yang sering digunakan, yaitu pengeluaran dan penerimaan daerah Ebel dan Yilmaz (2002) menyatakan terdapat variasi dalam pemilihan indikator untuk mengukur desentralisasi antara negara yang satu dengan negara yang lain. Meskipun sama-sama menggunakan variabel yang pengeluaran dan penerimaan pemerintah, yang menjadi pembeda adalah variabel ukuran (*size variables*) yang digunakan oleh peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Ada tiga *sizevariables* yang umum digunakan, yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah, dan GDP.

B. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan

Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (*inter region income gap*)

(Harahap, 2006). Kemiskinan relatif merupakan ukuran kesenjangan dalam distribusi pendapatan, biasanya terkait dengan ukuran dibawah tingkat rata-rata distribusi pendapatan nasional.(Todaro dan Smith 2006).

Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1995) pola kemiskinan ada empat yaitu, Pertama adalah *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun 20 temurun. Pola kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse,1953 dalam Mudrajad Kuncoro, (1997) secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a) Kemiskinan Absolut Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.
- b) Kemiskinan Relatif Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya, sehingga menimbulkan ketimpangan pada pendapatan

- c) Kemiskinan Kultural Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap seseorang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya meskipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

B. Indikator Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (2010) menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approach*) untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Lebih jauh lagi, BPS menggunakan garis kemiskinan yang merupakan penjumlahan dari batas kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan untuk melihat kemiskinan. Oleh karena itu penduduk memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dimasukkan ke dalam kelompok penduduk miskin.

Todaro (2011) mengungkapkan adanya sejumlah kriteria yang disepakati secara luas oleh para ekonom dalam menentukan tepat atau tidaknya suatu ukuran kemiskinan, yaitu prinsip anonimitas, independensi penduduk, monotonitas, dan sensitivitas distribusional. Prinsip monotonitas berarti jika ada penambahan pendapatan kepada seseorang yang berada di bawah garis kemiskinan, dengan semua pendapatan orang lain tetap, maka kemiskinan tidak mungkin lebih besar dari sebelumnya. Prinsip Distribusional menyatakan bahwa dengan semua hal lainnya sama, jika mentransfer pendapatan kepada orang miskin kepada orang yang lebih kaya maka perekonomian seharusnya dipandang menjadi lebih miskin.

C . Indikator Rumah Tangga Miskin

Rumah tangga dikatakan miskin apabila kehidupannya dalam kondisi serba kekurangan, sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Batas kebutuhan dasar minimal dinyatakan melalui ukuran garis kemiskinan yang disetarakan dengan jumlah rupiah yang dibutuhkan. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara memiliki beberapa indikator dalam menentukan rumah tangga miskin. Indikator tersebut antara lain:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di poliklinik/ rumah sakit

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan.
13. . Pendidikan tertinggi kepala kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Rumah tangga miskin sesuai dengan konsep kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara yaitu rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yang didasarkan pada garis kemiskinan makanan (2100 kkal per kapita per hari) dan non makanan. Jadi, rumah tangga miskin adalah rumah tangga yang pengeluaran perkapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. (<http://bps.sumut.go.id>) .

C. Kebijakan Dana Desa

Berdasarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (2016), Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan local skala Desa. Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota. Menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap Desa berdasarkan jumlah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing Desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata

dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap.

(www.kemendes.go.id)

1. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60%;
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%.

Dana desa disalurkan oleh pemerintah pusat dengan melakukan pemindah bukuan dari rekening kas umum Negara (RKUN) langsung ke rekening kas umum daerah (RKUD) masing-masing pemerintah daerah yang selanjutnya oleh Pemda diteruskan ke masing - masing Rekening

Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa di RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerima:

1. Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan
2. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa
3. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
4. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan *capaian output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala KPPN menerima:

1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan paling kurang sebesar 90% dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD;
2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan *capaian output* Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% dan rata-rata *capaian output* paling

kurang sebesar 50%. Capaian *output* paling kurang sebesar 50% dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian *output* dari seluruh desa.

Penyaluran Dana Desa, sebagaimana dimaksud di atas berlaku mulai tahun 2018. Untuk tahun 2017, ditentukan sebagai berikut:

1. Tahap I, paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juli sebesar 60%;
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%.

Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017, disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan selanjutnya untuk Tahap II disampaikan ke KPPN. Dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I sampai dengan bulan Juli dan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

2. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. BAB IV tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25 yang bunyinya sebagaimana berikut:

a. Pasal 21

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Pedoman Umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

b. Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

c. Pasal 23

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota. Persetujuan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

d. Pasal 24

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa. Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

e. Pasal 25

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

1. Semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
2. Semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Bupati/Walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasipenggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun anggaran berjalan. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran berikutnya. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (www.kemendesa.go.id)

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

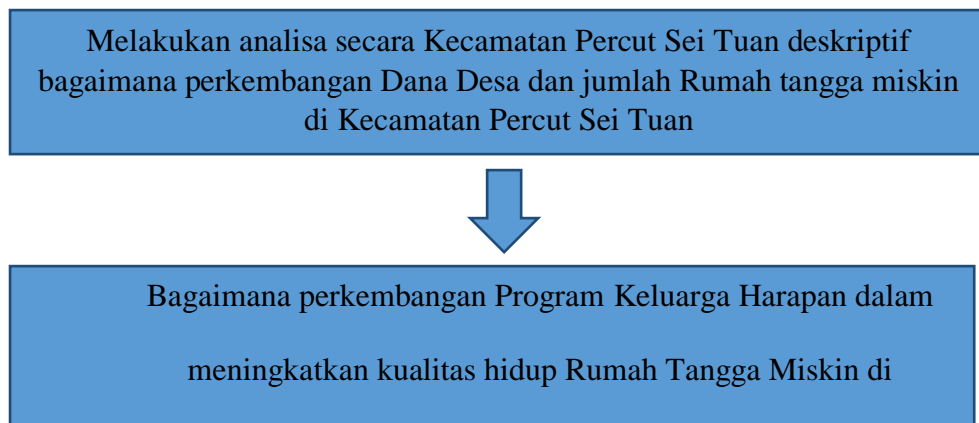
No	Peneltiti dan Judul Penelitian	Variable	Hasil penelitian
1	Suci R. Prima, Analisis	Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil,	Alat analisis yan digunakan dalam

	Ketimpangan Pengalokasian Dana Desa Antar wilayah Di Indonesia Tahun 2015	Dana Alokasi Umum, Jumlah penduduk jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kemahalan Kontruksi	penelitian ini adalah indeks Williamson, koefisien variasi dan regresi logit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara matematis formula dana desa tahun 2015 memang telah di desain secara semerata mungkin, dan mampu mereduksi ketimpangan fiscal sebesar 1,13 persen. Namun secara teoritis dana desa masih mengindikasikan ketimpangan karena proporsi alokasi dasar yang besar dan dititik beratkan pada jumlah desa . alternative formula dengan memperbesar proporsi alokasi formula yang menunjukkan distribusi dana yang semakin merata, sementara formula dengan konsep celah fiskal dapat memunculkan kesalahan alokasi . sekitar 56 persen daerah di Indonesia memperoleh surplus dana desa dan sisanya 49 persen memperoleh deficit dana desa.
2	Nilam Indah Susilowati, Dwi Susilowati, Syamsul Hadi (2017) , Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di	Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan PDRB, dan Kemiskinan	Alokasi Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto efektif dan berhasil dalam mengurangi kemiskinan tiap Kabupaten/Kota. Sedangkan Dana Desa tidak efektif dan tidak berhasil dalam mengurangi kemiskinan

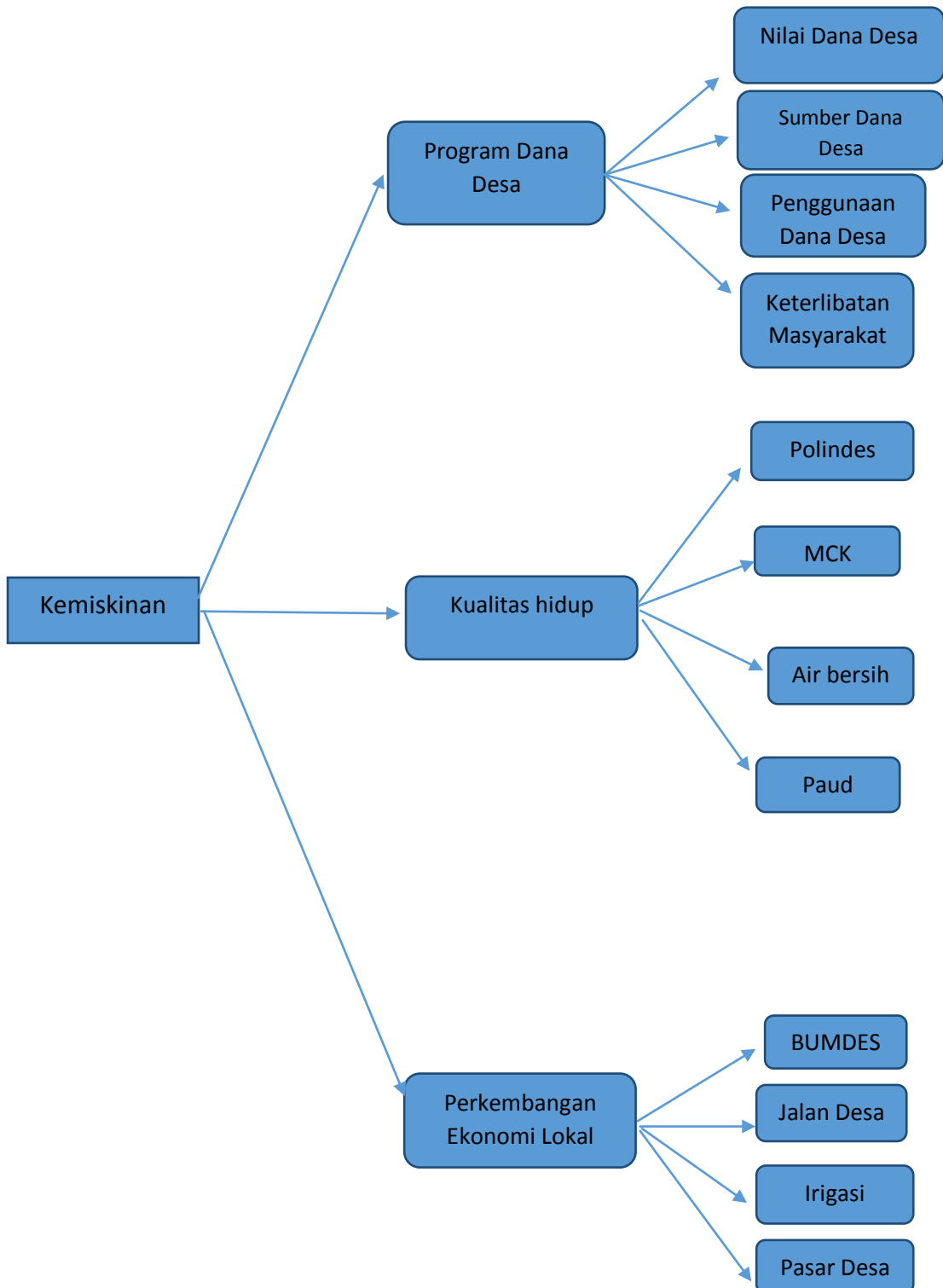
	Jawa Timur		di tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
3	Azwardi Sukanto , Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara	Alokasi Dana Desa, Indeks Kemiskinan, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum	Hasil penelitian menemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu : penyaluran dana ADD belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila dilihat dari jumlah yang disalurkan belum satupun yang memenuhi ketentuan yang berlaku (minimak 10% dari dana bagi hasil ditambah pajak dikurangi belanja pegawai)

2.4 Kerangka Penelitian

2.3.1 Bagan Tahapan Penelitian



2.3.2 Kerangka konseptual



Gambar 2.4Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi empiris guna memecahkan masalah dan menguji hipotesis dari sebuah penelitian.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan tujuan yang di inginkan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah. maka jenis penelitian yang di lakukan ini adalah penelitian primer. Tipe penelitian yang di gunakan yakni kualitatif.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasioanal merupakan acuan dari landasan teori yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana variabel yang satu dengan yang lain dapat dihubungkan sehingga dapat di sesuaikan dengan data yang di inginkan.

Tabel 3.1

Tabel Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Sumber Data
Kemiskinan	Keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi hak untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.	Responden
Program Dana Desa	Kebijakan pemerintah pusat dalam penyaluran transfer ke daerah.	Responden
Kualitas Hidup	Dilihat dari respon individu terhadap keadaan sekarang yang sedang menderita.	Responden
Perkembangan Ekonomi Lokal	Kemampuan masyarakat	Responden

	desa dalam meningkatkan perkembangan ekonomi desa.	
--	--	--

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di seluruh desa di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data primer yaitu data yang diperoleh melalui kuisioner kepada para petani yang dijadikan sampel. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data yang didapatkan dari arsip yang dimiliki organisasi instansi, studi pustaka, penelitian terdahulu, literature, dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3.4.2 Sumber Data

Agar data yang diperoleh relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian maka peneliti mengambil sumber data yang berasal dari :

1. Kantor Camat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
2. Kantor Desa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

3. Pihak-pihak yang terkait yang dinilai memberikan kontribusi data yang dapat dipertanggung jawabkan dan terbukti kebenarannya

3.5 Populasi Dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin di Kecamatan Percut Sei Tuan yang berjumlah 8.131 KK.

3.5.2 Sampel

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan ialah *Probability sampling*, pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (daerah) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik sampling yang digunakan adalah *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sebagai sampel penelitian. Jumlah populasi sebanyak 8.131 KK, rumus untuk menentukan sampel yaitu menggunakan rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Total Populasi

e = Batas Toleransi Kesalahan (*error tolerance*) e = 15% (0,15)

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 8.131 KK sehingga persentase kelonggaran yang digunakan adalah 15% dan hasil perhitungan dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Maka untuk mengetahui sampel penelitian, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{8131}{1 + 8131(0,15\%)^2} = 44 \text{ Kepala Keluarga}$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka peneliti menetapkan anggota sampel yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah 44 Kepala Keluarga

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data primeryaitu yang diperoleh dari :

1. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen serta catatan- catatan untuk mendukung penelitian ini dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji, serta menelaah literatur-literatur berupa buku, makalah, dan jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian.

2. Wawancara

Yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat desa dan pemerintah desa yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Kuesioner

Teknik ini dilakukan dengan membagikan kuesioner dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan kepada responden secara langsung dan segera dikembalikan kepada peneliti

3.7 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan pada pembahasan permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah pembuktian dengan menggambarkan keadaan yang terjadi secara umum.

3.7.1 Analisa Secara Deskriptif Perkembangan Dana Desa dan Jumlah Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Percut Sei Tuan

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian.

Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan Dana Desa dan jumlah rumah tangga miskin di kecamatan percut sei tuan

3.7.2 Analisa secara Deskriptif Bagaimana Persepsi Masyarakat Rumah Tangga Miskin Tentang Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup

a. Teknik Analisis Data

Penelitian menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Dengan mencari share, pertumbuhan dan rasio dimana data tersebut dinyatakan dalam bentuk kategori dan juga di deskripsikan dalam bentuk persentasi dan table untuk memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian.

3.7.3 Evaluasi Secara Ekonomi Deskriptif dalam Rumah Tangga Miskin Penerima Bantuan di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi

dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambara Umum Kabupaten Deli Serdang

4.1.1 Kondisi Geografis

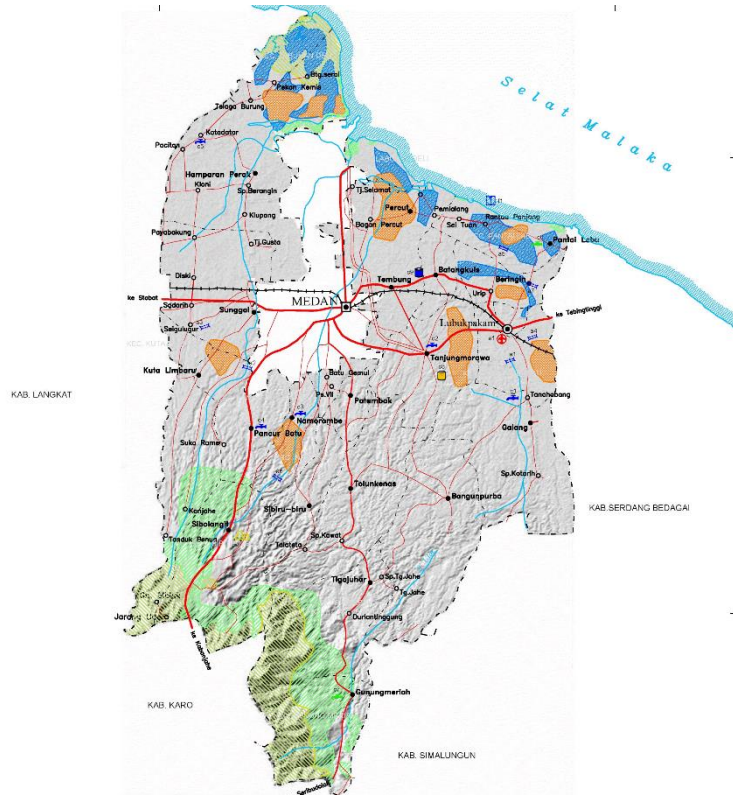
A. Letak

Secara geografis, Kabupaten Deli Serdang berada pada 2°57' Lintang Utara sampai 3°16' Lintang Utara dan 98°33' Bujur Timur sampai 99°27' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Deli Serdang memiliki luas 2.497,72 km². Batas area disebelah utara adalah Kabupaten Langkat dan Selat Malaka, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Karo.

Kabupaten Deli Serdang adalah daerah yang beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau biasanya di tandai dengan jumlah hari hujan pada tiap bulan terjadinya musim. Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 kecamatan dan 394 desa/kelurahan. Kecamatan tersebut antara lain adalah Gunung Meriah, Sinembah Tanjung Muda Hulu, Sibolangit, Kuta limbaru, Pancur Batu, Biru-Biru, Sinembah Tanjung Muda Hilir, Bangun Purba, Galang, Tanjung Morawa, Patumbak, Deli Tua, Sunggal, Hamparan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan, Batang Kuis , Pantai Labu, Beringin, Lubuk Pakam, dan Pagar. Merbau.

Dataran Tinggi/Pegunungan terdiri dari 7 kecamatan (Kutalimbaru, Sibolangit, Biru-biru, STM Hilir, STM Hulu, Gunung Meriah, Bangun Purba) dengan jumlah desa sebanyak 133 desa. Dataran Rendah terdiri dari 11 kecamatan (Sunggal, Pancur Batu, Namorambe, Deli Tua, Batang Kuis, Tanjung Morawa,

Patumbak, Lubuk Pakam, Beringin, Pagar Merbau, dan Galang) dengan jumlah desa sebanyak 197 desa/kelurahan. Daratan pantai terdiri dari 4 kecamatan (Hamparan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan, dan Pantai Labu). Jumlah Desa sebanyak 64 Desa/Kelurahan.



Gambar 4.1 Peta Deli Serdang

Sumber: BPS (www.bps.go.id)

Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 Kecamatan dan 394 Desa/Kelurahan Definitif yang mana luas masing-masing Desa/Kelurahan.

Tabel 4.1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang 2016

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Presentase
1.	Gunung Meriah	76,65	3,07
2.	Sinembah Tanjung Muda Hulu	223,38	8,94
3.	Sibolangit	179,96	7,20
4.	Kutalimbaru	174,92	7,00
5.	Pancur Batu	122,53	4,91
6.	Namo Rambe	62,30	2,49
7.	Biru-biru	89,69	3,59
8.	Sinembah Tanjung Muda Hilir	190,50	7,63
9.	Bangun Purba	129,95	5,20
10.	Galang	150,29	6,02
11.	Tanjung Morawa	131,75	5,27
12.	Patumbak	46,79	1,87
13.	Deli Tua	9,36	0,37
14.	Sunggal	92,52	3,70
15.	Hampan Perak	230,15	9,21
16.	Labuhan Deli	127,23	5,09
17.	Percut Sei Tuan	190,79	7,64
18.	Batang Kuis	40,34	1,62
19.	Pantai Labu	81,85	3,28
20.	Beringin	52,69	2,11
21.	Lubuk Pakam	31,19	1,25
22.	Pagar Merbau	62,89	2,52
Deli Serdang		2497,72	100,00

Sumber: BPS (www.bps.go.id)

Berdasarkan luas wilayah menurut kecamatan di kabupaten Deli Serdang pada tahun 2016, Deli Serdang memiliki luas wilayah sebesar 2497,72 KM² .

Kecamatan Hampan Perak merupakan wilayah terluas di Kabupaten Deli Serdang sebesar 230,15 KM². Dan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Deli Tua sebesar 9,36 KM² atau sebesar 0,37% di bandingkan luas Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2016.

B. Topografi

Secara topografis daerah Kabupaten Deli Serdang sebagian besar terletak didaerah pantai timur Sumatera utara dan secara umum terletak di ketinggian 0-1000 m di atas permukaan laut, dengan pembagian wilayah berdasarkan elevasi (ketinggian) sebagai berikut :

- Dataran rendah dan tanah pesisir dengan ketinggian 0 – 500 m di atas permukaan laut, seluas 88% dari total terletak di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Gunung Meriah
- Daerah perbukitan dengan ketinggian 100 – 1.000 m di atas permukaan laut, seluas 11% dari total terletak di sebagian Kecamatan Gunung Meriah, STM Hulu, Sibolangit dan Kutalimbaru.
- Daerah pegunungan dengan ketinggian di atas 1.000 m dari permukaan laut, seluas 1% dari total terletak di sebagian Kecamatan Gunung Meriah, STM Hulu, Sibolangit dan Kutalimbaru.

4.1.2 Demografis

A. Jumlah Penduduk

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017

Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Total	Persentase	Kepadatan Per Km ²
Gunung meriah	76,65	3029	0,14	40
S.T.M Hulu	223,38	14625	0,69	65
Sibolangit	179,96	23532	1,11	131
Kutalimbaru	174,92	42428	2,01	243
Pancur Batu	122,53	100392	4,75	819
Namo Rambe	62,30	43185	2,04	693
Biru-biru	89,69	40326	1,91	450
S.T.M Hilir	190,50	36310	1,72	191
Bangun Purba	129,95	25624	1,21	197
Galang	150,29	73043	3,45	486
Tanjung Morawa	131,75	227051	10,74	1723
Patumbak	46,79	104449	4,93	2232
Deli Tua	9,32	71501	3,38	7672
Sunggal	92,52	287600	13,60	3109
Hampan Perak	230,15	177259	8,38	770
Labuhan Deli	127,23	71962	3,36	559
Percut Sei Tuan	190,79	454202	21,48	2381
Batang Kuis	40,40	66406	3,14	1644
Pantai Labu	81,85	50953	2,41	623
Beringin	52,69	61112	2,94	1179
Lubuk Pakam	31,19	96038	4,54	3079
Pagar Merbau	62,89	43500	2,06	692
Deli Serdang 2017	2497,72	2114627	100,00	847
2016	2497,72	2072521	100,00	830
2015	2497,72	2029308	100,00	812

Sumber: BPS (www.bps.go.id)

Pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang menjadi sebesar 2.114.627 jiwa yang sebelumnya pada tahun 2016 sebesar 2.072.521 jiwa sedangkan pada tahun 2015 2.029.308 jiwa. Untuk Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ialah Percut Sei Tuan dengan jumlah 454.202 jiwa dengan persentase sebesar 21,48 % di Kabupaten

Deli Serdang, sedangkan yang memiliki jumlah penduduk yang terendah ialah Gunung Meriah dengan jumlah 3.029 jiwa dengan pesentase sebesar 0,14 % di Kabupaten Deli Serdang.

B. Jumlah Tenaga Kerja

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Dan Bukan Angkatan kerja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017

Kegiatan Utama	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah Total
Angkatan Kerja	622480	349282	971762
• Bekerja	588971	322902	911873
• Pengangguran Terbuka	33509	26380	59889
Bukan Angkatan Kerja	118811	392361	511172
• Sekolah	76767	66491	143258
• Mengurus Rumah Tangga	14493	301196	315689
Lainnya	27551	24674	52225
Jumlah/ Total	741291	741643	1482934
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	83,97	47,10	65,53

Sumber: BPS (www.bps.go.id)

Berdasarkan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Deli Serdang yang merupakan angkatan kerja ialah sebesar 971.762 jiwa sedangkan yang bukan angkatan kerja ialah sebesar 511.172 jiwa. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 65,53% dan tingkat pengangguran sebesar 6,16% pada tahun 2017.

4.1.3 Kondisi Ekonomi

A. Nilai PDRB

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Perubahan tersebut dapat dilihat dari perubahan jumlah produksi yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi, yang merupakan suatu gambaran tingkat perubahan ekonomi suatu daerah. Bagi suatu

daerah hal ini merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang dicapai dan dapat digunakan sebagai alat menentukan arah kebijakan pembangunan selanjutnya.

Perkembangan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan daerah tersebut, terjadinya pertumbuhan PDRB suatu daerah dapat disebabkan dari meningkatnya kontribusi salah satu subsektor yang ada pada daerah tersebut. Berikut ini tabel PDRB Kabupaten Deli Serdang atas dasar harga konstan dari tahun 2013 sampai 2017

Tabel 4.4

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Deli Serdang 2013-2017 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha PDRB	pdrb atas harga berlaku tahun 2013-2017				
	2013	2014	2015	2016	2017
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7825188.42	8163095.48	8575183.87	9221090.85	9825525.20
B. Pertambangan dan Penggalian	512320.01	538947.11	595658.59	658671.94	687200.50
C. Industri Pengolahan	20634450.13	22765072.27	24814769.03	27251492.54	30028294.32
D. Pengadaan Listrik dan Gas	79588.52	82483.33	91159.26	94375.48	116738.80
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	27900.68	31428.01	34950.91	39056.52	44511.50
F. Konstruksi	9248095.49	10441300.01	11629638.24	13052470.44	14556566.52
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9757261.87	10862050.44	12197294.85	13783594.10	15250172.40
H. Transportasi dan Pergudangan	3565110.65	6244138.52	6999308.39	7868517.06	8380207.28
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1552984.64	1777269.28	1996591.07	2227455.42	2491640.10
J. Informasi dan Komunikasi	778656	813986.04	873496.14	941932.67	1025538.10
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1845271.70	1992905.94	2210617.99	2472522.70	2624476
L. Real Estat	2034469.67	2337134.96	2696828.91	3114391.49	3464709
M,N. Jasa Perusahaan	258949.90	292543.15	333007.97	374579.21	420369.26
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1254502.11	1422457.10	1574227.57	1701688.58	1773384.03
P. Jasa Pendidikan	995553.98	1115081.16	1205679.47	1318682.60	1374119
Q. Jasa Kesehatan dan	524737.69	603108.02	692139.81	791659.60	866375.29

Kegiatan Sosial					
R,S,T,U. Jasa lainnya	166813.06	191058.55	214078.01	239835.65	264066.70
PDRB	61061854.50	69674059.40	76734630.10	85152016.80	93193894

Sumber: BPS (www.bps.go.id)

Dari tabel PDRB Kabupaten Deli Serdang tersebut, dapat kita lihat terjadi kenaikan setiap tahunnya selama periode 5 tahun tersebut. Pada tahun 2013 jumlahnya adalah sebesar 61061854.50 dan meningkat pada tahun 2014 adalah sebesar 69674059.40 dan kembali meningkat pada tahun 2015 adalah sebesar 76734630.10 dan terus meningkat hingga tahun 2017 adalah 85152016.80. Sektor yang paling tinggi dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang selama 5 tahun terakhir adalah sektor industri pengolahan pada tahun 2017 dengan memberikan sebesar Rp 20423838.10 juta. Dari sektor tersebut kontribusi terbesar mengalami kenaikan setiap tahunnya selama periode 5 tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Deli Serdang merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Sumatera Utara yaitu kota Medan, sehingga Kabupaten Deli Serdang merupakan kawasan strategis industri. Kemudian sektor yang paling sedikit memberikan kontribusi adalah pengadaan air, pengolahan sampah limbah dan daur ulang pada tahun 2013 menyumbang sebesar Rp 23875.47 juta

Pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terbesar adalah pada tahun 2017 dengan jumlah sebesar Rp 7850074.30 juta. Dalam pertanian Provinsi Sumatera Utara, hal ini menunjukkan suatu keberhasilan dan kontribusi yang besar terhadap daerahnya, dari beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang mampu menjadi salah satu wilayah satu daerah pertanian yang menjadi lumbung

khususnya produksi padi di provinsi Sumatera Utara. Untuk melihat laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Deli Serdang selama 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2013 sampai 2017 berikut grafik laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Deli Serdang atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 4.5

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Deli Serdang 2013-2017 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha PDRB	PDRB harga Konstan tahun 2013-2017				
	2013	2014	2015	2016	2017
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6751263.33	6868878.89	7152905.54	7452729.62	7850074.30
B. Pertambangan dan Penggalian	444183.58	460377.31	476774.77	501853.55	527943.60
C. Industri Pengolahan	17589772.76	18214337.68	18920121.26	19739057.05	20423838.10
D. Pengadaan Listrik dan Gas	76201.24	83393.40	89530.62	93921.93	102719
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	23875.47	25030.25	26440.18	27908.35	29486.90
F. Konstruksi	7696443.29	8101721.07	8653726.33	9191718.34	9786791.30
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8564483.26	9156421.52	9711703.64	10304705.01	10820947
H. Transportasi dan Pergudangan	2795986.47	4469368.94	4698335.97	5016817.94	5424706.10
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1320823.61	1410828.12	1515318.72	1621082.97	1748369.70
J. Informasi dan Komunikasi	788216.92	832028.47	885726.16	932185.73	986944.60
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1503074.24	1533089.18	1631650.76	1712865.17	1755219.20
L. Real Estat	1628535.84	1757573.79	1892096.47	2030872.29	2186529.30
M,N. Jasa Perusahaan	221571.34	237718.99	254697.12	272135.55	291115.20
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	999010.27	1047487.17	1105804.65	1130292.60	1154416.20
P. Jasa Pendidikan	887643.53	944438.92	1004273.52	1068299.77	1106922.80
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	465853.46	500842.86	538243.48	577840.16	620787.30
R,S,T,U. Jasa lainnya	139123.43	147212.55	156324.38	165388.83	175060.70

PDRB	51896062.04	55790749.10	58713673.59	61839674.87	64991871.30
------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Sumber: BPS (www.bps.go.id)

Dari tabel PDRB Kabupaten Deli Serdang tersebut, dapat kita lihat terjadi kenaikan setiap tahunnya selama periode 5 tahun tersebut. Pada tahun 2013 jumlahnya adalah sebesar 51896062.04 dan meningkat pada tahun 2014 adalah sebesar 55790749.10 dan kembali meningkat pada tahun 2015 adalah sebesar 58713673.59 dan terus meningkat hingga tahun 2017 adalah 64991871.30. Sektor yang paling tinggi dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang selama 5 tahun terakhir adalah sektor industri pengolahan pada tahun 2017 dengan memberikan sebesar Rp 20423838.10 juta. Dari sektor tersebut kontribusi terbesar mengalami kenaikan setiap tahunnya selama periode 5 tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Deli Serdang merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Sumatera Utara yaitu kota Medan, sehingga Kabupaten Deli Serdang merupakan kawasan strategis industri. Kemudian sektor yang paling sedikit memberikan kontribusi adalah pengadaan air, pengolahan sampah limbah dan daur ulang pada tahun 2013 menyumbang sebesar Rp 23875.47 juta

Pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terbesar adalah pada tahun 2017 dengan jumlah sebesar Rp 7850074.30 juta. Dalam pertanian Provinsi Sumatera Utara, hal ini menunjukkan suatu keberhasilan dan kontribusi yang besar terhadap daerahnya, dari beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang mampu menjadi salah satu wilayah satu daerah pertanian yang menjadi lumbung khususnya produksi padi di provinsi Sumatera Utara. Untuk melihat laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Deli Serdang selama 5 tahun terakhir yaitu pada

tahun 2013 sampai 2017 berikut grafik laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Deli Serdang atas dasar harga konstan 2010.

B. PDRB Perkapita

Tabel 4.6

PDRB Per Kapita(Juta Rupiah) dan Pertumbuhan (Persen) Deli Serdang Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2013-2017

Tahun	ADH Berlaku		ADH Konstan	
	NILAI	PERTUMBUHAN	NILAI	PERTUMBUHAN
2013	31,47	22,23	26,75	6,55
2014	35,11	11,55	28,11	5,1
2015	37,81	7,71	28,93	2,92
2016	41,09	8,66	29,84	54,89
2017	44,07	7,26	30,73	21,98

Sumber: BPS (www.bps.go.id)

PDRB per kapita Deli Serdang atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 sebesar 31,47 juta rupiah dan meningkat menjadi 44,07 juta rupiah pada tahun 2017. Apabila dilihat menurut harga berlaku, angka tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Sementara itu, jika dilihat dari penghitungan atas dasar harga konstan 2010, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), maka pada periode 2013-2017 terjadi peningkatan yang relatif stabil. Tahun 2017, PDRB per kapita Deli Serdang atas dasar harga konstan mencapai 30,73 juta rupiah.

4.1.4 Kondisi Sosial

A. kemiskinan

Tabel 4.7

Garis kemiskinan Dan Penduduk Miskin Di Kabupaten Deli Serdang (2013-2017)

Tahun	Garis kemiskinan	Jumlah/ Total	Persentase
2013	288770	91973	4,71
2014	292551	90910	4,56
2015	304183	95650	4,74

2016	347030	100090	4,86
2017	363371	97090	4,62

Sumber: BPS (www.bps.go.id)

Garis kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang selalu mengalami peningkatan dari tahun 2013-2017 yaitu pada tahun 2017 mencapai sebesar Rp. 363.371 dari jumlah penduduk miskin sebanyak 97.090 jiwa dengan persentase mencapai 4,92 %. Untuk Jumlah penduduk miskin terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 90.910 jiwa dan garis kemiskinannya Rp. 292.551 dengan persentase sebesar 4,56 %.

B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tabel 4.8

Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013-2017

Komponen IPM	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup	70,78	70,80	71,00	71,06	71,11
Harapan Lama Sekolah	11,77	12,11	12,52	12,96	12,90
Rata-rata lama Sekolah	9,37	9,46	9,48	9,68	9,70
Pengeluaran Perkapita	10924	11065	11359	11583	11891
IPM / HDI	71,39	71,98	72,79	73,51	73,94

Sumber: BPS (www.bps.go.id)

Berdasarkan komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2013-2017, dari tahun ke tahun angka harapan hidup selalu mengalami peningkatan seperti dari tahun 2013 sebesar 70,78 tahun menjadi sebesar 70,80 tahun pada tahun 2014, sedangkan untuk tahun 2017 yaitu sebesar 71,11 tahun. Hal ini merupakan dampak dari adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Untuk rata-rata lama sekolah di Kabupaten Deli Serdang cukup rendah yaitu pada tahun 2017 hanya 9,70 tahun dan tahun 2016 sebesar 9,68 tahun.

Berarti pada tahun 2017, rata – rata penduduk Kabupaten Deli Serdang yang berusia 25 tahun ke atas hanya mengecap bangku pendidikan formal selama 9,70 tahun. IPM menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah, untuk IPM kabupaten Deli Serdang peningkatannya cukup signifikan yang pada tahun 2013 hanya sebesar 71,39 sedangkan pada tahun 2017 sebesar 73,94.

4.2. Kecamatan Percut Sei Tuan

4.2.1 Geografi

Percut Sei Tuan merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Secara geografis berada 3°54′ Lintang Utara sampai 3°83′ Lintang Utara dan 98°72′ Bujur Timur sampai 98°86′ Bujur Timur.

Kecamatan Percut Sei Tuan menempati area seluas 190,79 km² yang terdiri dari 18 Desa 2 Kelurahan dan 230 Dusun 24 Lingkungan. Batas wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dapat dilihat sebagai berikut :

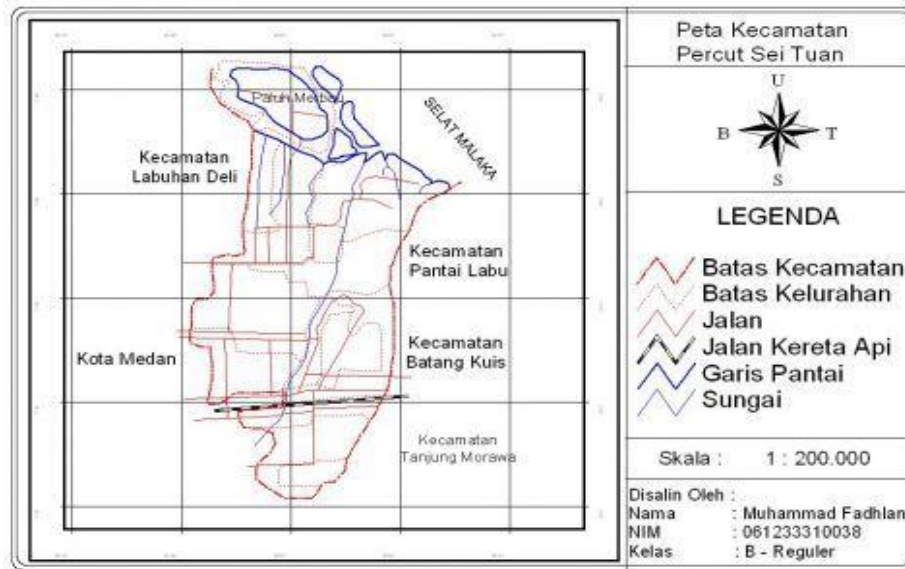
Sebelah Utara : Selat Malaka

Sebelah Selatan : Kecamatan Batang Kuis dan Pantai Labu

Sebelah Barat : Kota Medan

Sebelah Timur : Kecamatan Labuhan Deli dan Kota Medan

Topografi lahan baik lahan sawah maupun darat rata-rata datar dengan kemiringan kurang dari 5% dan berjenis tanah alluvial, kondisi tanah di Kecamatan Percut Sei Tuan memiliki bentuk wilayah yang landai (dataran rendah) dengan ketinggian 0-20 meter diatas permukaan laut.



Gambar 4.2 Peta Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan

Kondisi iklim yang terdapat di Kecamatan Percut Sei Tuan adalah iklim tropis dan memiliki musim hujan dan musim kemarau, cuaca suhu udara kecamatan Percut Sei Tuan pada umumnya panas dan sedang. Sedangkan untuk curah hujan 2330 mm/thn dengan bulan kering kurang dari 3 bulan dan digolongkan Tipe D₁ Oldeman, dan mengenai suhu udara adalah 27°C hingga 33°C dan kelembaban udara 75%-80%.

Kecamatan Percut Sei Tuan terdiri dari 18 Desa 2 Kelurahan yang mana luas masing-masing Desa/Kelurahan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 4.9

Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Percut Sei Tuan 2016

No.	Desa/Kelurahan	Luas (km ²)	Presentase
1.	Amplas	3,10	1,81
2.	Kenangan	1,27	0,74
3.	Tembung	5,35	3,13
4.	Sumber Rejo Timur	4,16	2,44
5.	Sei Rotan	5,16	3,02
6.	Bandar Kalippa	18,48	10,82

7.	Bandar Khalipa	7,25	4,24
8.	Medan Estate	6,90	4,04
9.	Laut Dendang	1,70	1,00
10.	Sampali	23,93	14,01
11.	Bandar Setia	3,50	2,05
12.	Kolam	5,98	3,50
13.	Saentis	24,00	14,05
14.	Cinta Rakyat	1,48	0,87
15.	Cinta Damai	11,76	6,89
16.	Pematang Lalang	20,10	11,77
17.	Percut	10,63	6,22
18.	Tanjung Rejo	19,00	11,12
19.	Tanjung Selamat	16,33	9,56
20.	Kenangan Baru	0,72	0,42
Percut Sei Tuan		170,79	100,00

Sumber: BPS (www.bps.go.id)

Berdasarkan luas wilayah menurut desa/kelurahan di Kecamatan Percut Sei Tuan 2016 desa Sientis memiliki luas wilayah sebesar 24,00 km² dengan persentase 14,05% di Kecamatan Percut Sei Tuan. Sampali memiliki luas wilayah 23,93 km² dengan persentase 14,01% . Bandar khalipah memiliki luas wilayah sebesar 8,48 km² dengan persentase sebesar 10,82% di kecamatan Percut Sei Tuan pada tahun 2016. Sedangkan untuk daerah yang paling kecil luas wilayahnya di kecamatan Percut Sei Tuan dengan persentase 0,42% yaitu kenangan baru yaitu dengan luas wilayah sebesar 0,72 km².

4.1.2 Kondisi Demografi

A. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2016 tercatat 2.072.521 jiwa, dengan rincian 1.043.114 jiwa penduduk laki-laki dan 1.029.407 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin menurut Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.11 dibawah ini.

Tabel 4.10

Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang 2016

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin (jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Gunung Meriah	1477	1472	2949	100,34
2.	Sinembah Tanjung Muda Hulu	7202	7125	14327	101,08
3.	Sibolangit	11469	11539	23008	99,39
4.	Kutalimbaru	20940	20876	41549	99,03
5.	Pancur Batu	49243	49124	98367	100,24
6.	Namo Rambe	20940	21406	42346	97,82
7.	Biru-biru	19833	19665	39498	100,85
8.	Sinembah Tanjung Muda Hilir	18055	17498	35553	103,18
9.	Bangun Purba	12535	12551	25086	99,87
10.	Galang	35928	35592	71520	100,94
11.	Tanjung Morawa	112281	110353	222634	101,75
12.	Patumbak	51952	50518	102470	102,84
13.	Deli Tua	34524	35573	70097	97,05
14.	Sunggal	142031	139978	282009	101,47
15.	Hamparan Perak	88310	85398	173708	103,41
16.	Labuhan Deli	35430	34225	69655	103,52
17.	Percut Sei Tuan	223927	221296	445223	101,19
18.	Batang Kuis	33091	32071	65090	102,96
19.	Pantai Labu	25744	24194	49938	106,41
20.	Beringin	30851	29989	60840	102,87
21.	Lubuk Pakam	46598	47435	94033	98,24
22.	Pagar Merbau	21092	21529	42621	97,97
Deli Serdang 2016		1043114	1029407	2072521	101,33
2015		1021188	1008120	2029308	101,30

Sumber: BPS (www.bps.go.id)

Jumlah penduduk Kecamatan Percut Sei Tuan pada tahun 2016 tercatat 454.202 jiwa, dengan rincian 228.443 jiwa penduduk laki-laki dan 225.759 jiwa

penduduk perempuan. Jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin menurut desa/kelurahan dapat dilihat pada Tabel 4.12 dibawah ini.

Tabel 4.11
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Percut Sei Tuan 2017

No.	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin (jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Amplas	5.110	4.839	9.949	106
2.	Kenangan	12.855	13.653	26.508	94
3.	Tembung	30.455	29.515	59.970	103
4.	Sumber Rejo Timur	14.925	14.421	29.346	103
5.	Sei Rotan	15.064	14.967	30.031	101
6.	Bandar Kalippa	20.850	20.285	41.135	103
7.	Bandar Khalipa	22.923	22.450	45.373	102
8.	Medan Estate	8.792	9.380	18.172	94
9.	Laut Dendang	8.967	8.715	17.682	103
10.	Sampali	16.011	16.708	32.719	96
11.	Bandar Setia	12.484	11.749	24.233	106
12.	Kolam	8.666	8.423	17.089	103
13.	Saentis	9.742	9.395	19.137	104
14.	Cinta Rakyat	7.737	7.414	15.151	104
15.	Cinta Damai	2.811	2.792	5.603	101
16.	Pematang Lalang	962	874	1.836	110
17.	Percut	8.056	7.756	15.812	104
18.	Tanjung Rejo	5.667	5.347	11.014	106
19.	Tanjung Selamat	3.115	3,014	6.169	105
20.	Kenangan Baru	13.211	14.062	27.273	94
Percut Sei Tuan 2017		228.443	225.759	454.202	101
2016		223.927	221.296	445.223	101

Sumber: BPS (www.bps.go.id)

Pada Tabel 4.12 dapat kita lihat struktur penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Percut Sei Tuan. Struktur penduduk di Kecamatan Percut Sei Tuan

berdasarkan usia terbagi atas dua kategori, yaitu usia belum produktif (0-14 tahun) dan usia produktif (lebih dari 14 tahun).

Tabel 4.12

Jumlah Penduduk Kategori Usia Belum Produktif, Produktif dan Tidak Produktif Per Desa/Kelurahan di Kecamatan Percut Sei Tuan (jiwa) 2017

No.	Desa/Kelurahan	Belum Produktif (0-14)	Produktif (15-64)	Tidak Produktif Lagi (65+)	Jumlah
1.	Amplas	3473	6252	224	9949
2.	Kenangan	6211	19277	1020	26508
3.	Tembung	18195	40516	1259	59970
4.	Sumber Rejo Timur	9209	19194	943	29346
5.	Sei Rotan	9273	19924	843	30031
6.	Bandar Kalippa	12016	27894	1225	41135
7.	Bandar Khalipa	13563	30547	1263	45373
8.	Medan Estate	4812	12943	417	18172
9.	Laut Dendang	5554	11643	485	17682
10.	Sampali	9194	22456	1069	32719
11.	Bandar Setia	7523	16000	710	24233
12.	Kolam	5470	11028	591	17089
13.	Saentis	5904	12475	758	19137
14.	Cinta Rakyat	4713	9941	497	15151
15.	Cinta Damai	1819	3465	319	5603
16.	Pematang Lalang	589	1131	107	1836
17.	Percut	5317	9932	563	15812
18.	Tanjung Rejo	3496	7054	464	11014
19.	Tanjung Selamat	2147	3815	207	6169
20.	Kenangan Baru	6401	19589	1283	27273
Percut Sei Tuan 2017		134888	305076	14238	454202
2016		133158	298594	13471	445223

Sumber: BPS (www.bps.go.id)

4.2.3 Perkembangan Dana Desa Di Kecamatan Percut Sei Tuan

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa, dalam melaksanakan program-program dana desa sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan desa melalui potensi geografis, ekonomi, sosial serta lingkungan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah secara bertahap.

Kementerian Keuangan Indonesia memberikan kebijakan transfer dana daerah berupa Dana Desa yang dilakukan secara merata baik penyebarannya maupun besarnya di seluruh Indonesia tergolong kurang efektif dan masih ada penyalahgunaan transfer dana daerah yang dilakukan oleh oknum-oknum politisi bahkan kepala daerah. Dengan adanya perbedaan karakteristik luas wilayah, jumlah penduduk, serta angka kemiskinannya dan keadaan perekonomian di setiap desa mengidentifikasi kurang efektifnya penyaluran dana desa. Setiap desa

di Kecamatan Percut Sei Tuan memiliki kebutuhannya masing-masing, contohnya saja keadaan desa yang maju dengan keadaan desa yang sedang berkembang jauh berbeda dan APBDesnya juga pasti berbeda. Di desa yang sedang membutuhkan sokongan dana desa yang lebih, guna meningkatkan keadaan perekonomian di desa Se Kecamatan Percut Sei Tuan.

Dana desa yang disalurkan di Kecamatan Percut Sei Tuan berbeda-beda jumlah dananya setiap desa sesuai dengan tingkat kesulitan letak geografisnya, jumlah penduduknya, luas wilayah serta angka kemiskinannya. Adapun jumlah dana desa yang ada di desa Se Kecamatan Percut Sei Tuan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 13
Data Jumlah Dana Desa Se Kecamatan Percut Sei Tuan 2015-2018

No	Desa	Dana Desa			
		2015	2016	2017	2018
1	Amplas	261310000	632400000	812420000	678863000
2	Kenangan	284026000	645217000	884570000	876754000
3	Tembung	294156000	621402000	712433000	675040000
4	Sumber Rejo Timur	297521000	667134000	821963000	731453000
5	Sei Rotan	284309000	630156000	801246000	703672000
6	Bandar Kalippa	276134000	627791000	779146000	668205000
7	Bandar Khalipa	287351000	646026000	824687000	692542000
8	Medan Estate	272734000	661314000	775243000	701343000
9	Laut Dendang	279024000	678901000	780951000	679034000
10	Sampali	280896000	658803000	780642000	663351000
11	Bandar Setia	276221000	649143000	802656000	693416000
12	Kolam	280056000	628354000	837629000	721469000
13	Saentis	271267000	657612000	841026000	739633000
14	Cinta Rakyat	279426000	643902000	770267000	670365000
15	Cinta Damai	270714000	660267000	762239000	692591000

16	Pematang Lalang	278943000	612615000	835619000	728729000
17	Percut	281014000	629422000	791221000	670346000
18	Tanjung Rejo	292671000	644046000	785106000	691451000
19	Tanjung Selamat	281416000	638561000	751479000	689242000
20	Kenangan Baru	279356000	678944000	803451000	709433000
	TOTAL	5608545000	12912010000	15953994000	14076932000

Sumber : Kantor Desa Se Kecamatan Percut Sei Tuan 2018

4.3 Analisa Deskriptif Secara Ekonomi

4.3.1 Perkembangan Dana Desa Dabn Jumlah Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Percut Sei Tuan

Berdasarkan tabel diatas, jumlah dana desa dari tahun 2015-2018 di desa Se Kecamatan Percut Sei Tuan mengalami peningkatan dari tahun 2015-2017 sebesar Rp 5.608.545.000 milyar menjadi Rp 15.953.994.000 milyar , sedangkan 2018 dana desa yang ada di desa Se Kecamatan Percut Sei Tuan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 14.076.932.000 milyar rupiah. Penurunan ini diakibatkan tidak maksimalnya penggunaan dana desa yang ada di desa Se Kecamatan Percut Sei Tuan. Selain itu jumlah dana desa setiap desa di Kecamatan Percut Sei Tuan berbeda-beda sesuai dengan kriteria desanya masing-masing. Dana desa ini digunakan untuk melakukan pembangunan desa khususnya di desa Se Kecamatan Percut Sei Tuan yaitu menunjang aktivitas masyarakat desa di Kecamatan Percut Sei Tuan seperti pembangunan jalan desa, jembatan, pasar desa, embung, irigasi, sarana olahraga dan lain-lain. Selain itu juga dana desa dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa di Kecamatan Percut Sei Tuan seperti membangun polindes, air bersih, Mck, Paud, Drainase, dan Penahan Tanah. Jadi penggunaan dana desa setiap tahun dari tahun 2015 sampai 2018 di desa Se Kecamatan Beringin berbeda-beda sesuai dengan yang di butuhkan setiap

desa, seperti pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, prasarana transportasi umum, jembatan, teknologi dan lain sebagainya.

4.3.2 Analisis Perkembangan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan yang digulirkan oleh Kementerian Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan yang baik dalam memberikan kontribusi sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan. Berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH), tujuan yang terdapat dalam pelaksanaan program ini sangat jelas dan detail. Adapun tujuan dari pelaksanaan PKH yaitu sesuai yang tercantum dalam Pedum PKH (2008, h.12) yaitu:

1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM;
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM;
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses yang menjadi penentu pelaksanaan PKH di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang salah satunya yaitu adanya langkah-langkah persiapan pelaksanaan terlebih dahulu agar tujuan yang diinginkan tercapai. Proses persiapan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan meliputi proses persiapan pelaksanaan mulai dari pemilihan kabupaten/kota oleh BPS (Badan Pusat Statistik), penentuan lokasi penerima PKH, pemilihan pendamping, dan menentukan peserta PKH. Selain itu, dalam proses pengumpulan data dan informasi harus ada kerja sama antar satuan kerja

terkait. Dengan adanya kerjasama maka tujuan program akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yaitu dengan membuat strategi dan melakukan sosialisasi. Adapun strategi pelaksanaan yang dilakukan oleh pelaksana program yaitu dengan melakukan kunjungan rutin pada setiap RTSM dan memantau kebutuhan sekolah maupun kondisi Ibu hamil peserta PKH, pemantauan penggunaan dana setiap kali pencairan agar sesuai dengan fungsinya, membuat sebuah inovasi berupa pengadaan baju PKH bagi para ibu ibu PKH, memantau penggunaan kartu PKH agar sesuai dengan penggunaannya, dan sering mengadakan rapat koordinasi. Dengan sikap pendamping yang demikian, strategi dalam mesukseskan pelaksanaan PKH di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dapat berjalan dengan baik. Sedangkan proses sosialisasi yaitu dengan melakukan sosialisasi secara rutin di rumah ketua kelompok atau pada salah satu rumah peserta dengan seorang pendamping sebagai pemberi arahan. Dengan melakukan musyawarah bersama keikutsertaan atau partisipasi setiap peserta PKH maupun pendamping dan aktor terkait dapat membantu melancarkan pelaksanaannya.

Pelaksanaannya Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ini yang menjadi sasaran utama adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang sesuai kriteria yang telah ditetapkan yaitu ibu hamil, ibu menyusui, memiliki balita dan anak usia sekolah setingkat SD/MI, dan SMP/MTs. Berdasarkan peraturan perundang-undangan PKH dijalankan sebagai pelaksanaan dari UU No. 40 Tahun 2004 tentang jaminan

sosial nasional, UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tindak Percepatan Pencapaian Sasaran Program ProRakyat, dan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Merujuk pada Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tersebut, PKH menjadi sebuah model jaminan yang unik. Disatu sisi, PKH merupakan bantuan sosial yang dimaksudkan demi mempertahankan kehidupan dalam pemenuhan kebutuhan dasar terutama pendidikan dan kesehatan.

Besaran bantuan yang diberikan kepada peserta PKH berdasarkan skenario besaran bantuan terdiri dari bantuan tetap, bantuan bagi RTSM pada usia tertentu, rata-rata bantuan per RTSM, bantuan minimum per-RTSM, serta bantuan maksimum per RTSM. Ada catatan penting bahwa untuk bantuan terkait kesehatan berlaku bagi RTSM dengan anak di bawah 6 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Besar bantuan ini tidak dihitung berdasarkan jumlah anak. Besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan RTSM per tahun. Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata-rata RTSM per tahun.

Dalam setiap pelaksanaan suatu program yang menjadi salah satu unsur terpenting adalah pencapaian sebuah target. Dalam penelitian ini berdasarkan pernyataan dari pendamping berkaitan dengan hal tersebut target yang harus dicapai dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini yaitu terbantunya masyarakat tidak mampu khususnya RTSM dalam memenuhi kebutuhan hidup berkaitan dengan pendidikan anaknya dan kesehatan ibu hamil dan balita. Sampai saat ini pelaksanaan PKH di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdangmulai dari pertama pelaksanaan program telah terdapat

peningkatan mulai dari status pendidikan dan status peningkatan gizi ibu hamil dan balita.

Peningkatan partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu target dalam pelaksanaan PKH ini. Untuk meningkatkan partisipasi para peserta program yaitu dengan meningkatkan angka partisipasi wajib belajar bagi peserta didik dan meningkatkan partisipasi kesehatan bagi para ibu hamil dan balita dengan memeriksakan keadaan kesehatannya di posyandu maupun bidan desa. Jika partisipasi masyarakat tinggi maka secara tidak langsung akan berpengaruh pula pada peningkatan kualitas hidupnya. Oleh karena itu dengan adanya partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PKH ini akan dapat meningkatkan pembangunan yang pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat miskin.

Hasil dari evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk memberikan bukti nyata dalam pelaksanaan program terkait dengan pembiayaan maupun pencapaian tujuan. Dengan mengetahui hasil dari pelaksanaan PKH dalam beberapa tahun ini maka pendamping akan dapat mengetahui apakah pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik atau belum. Seperti yang dijelaskan oleh pendamping PKH di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang bahwa dalam melakukan evaluasi, sebelumnya dilakukan monitoring terhadap pelaksanaannya di wilayah PKH berlakunya, dari situ didapatkan beberapa hal yaitu perubahan kondisi jika dilihat dari sebelum menerima dan sesudah menerima program, adanya anggapan bahwa penerima PKH mau melakukan dan memenuhi komitmennya karena takut dengan adanya sanksi yang diberikan. Dan juga kurang pahami masyarakat terhadap

sanksi yang disosialisasikan menyebabkan munculnya masalah yaitu penggunaan kartu yang tidak sesuai atau melanggar kesepakatan. Jika kesepakatan dilanggar oleh peserta PKH maka sanksi yang diberikan yaitu pemotongan uang pada saat pencairan. Inilah memang seharusnya yang dilakukan bagi peserta yang melanggar komitmen karena PKH merupakan bantuan bersyarat yang menyaratkan bagi RTSM untuk mematuhi peraturan yang sudah menjadi kesepakatan bersama.

Oleh karena itu, sebuah monitoring yang dilakukan oleh para pendamping sangatlah penting agar dalam pelaksanaannya di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, PKH dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Pemberian sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera maupun rasa takut kepada RTSM untuk tidak melakukan kesalahan dalam keikutsertaannya. Selain terkait dengan masalah sanksi dalam pelanggarannya, pendamping juga melakukan monitoring kepada peserta PKH baik dalam bidang kesehatan maupun pendidikan.

Dalam pelaksanaan monitor evaluasi pelaksanaan PKH di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, beberapa pihak yang ikut serta antara lain BPK, lembaga pendidikan seperti Unair, Bapeda dan perwakilan staf UPPKH pusat. Yang paling penting dalam melaksanakan evaluasi harus didasarkan pada indikator hasil dan dampak yang diberikan oleh program. Berdasarkan hasil penelitian, program ini telah mampu membantu mengurangi kebutuhan hidup RTSM. Tidak hanya itu jumlah peserta PKH juga mengalami penurunan penerima program yang pada awal pelaksanaan 692 peserta dan pada tahun 2018 berkurang menjadi 528 peserta saat ini. Secara tidak langsung hal ini membuktikan pelaksanaan PKH di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang mampu

memberikan hasil yang baik dengan berkurangnya peserta PKH sebanyak 164 peserta walaupun hasil ini dirasa masih belum signifikan mengurangi angka kemiskinan yang ada. Dengan ini dapat di katakan bahwa program PKH ini juga memberikan kontribusi dalam memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan hidup terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan anak. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya program yang masih berjalan sampai saat ini, nantinya rumah tangga miskin yang menjadi.

Setelah saya meneliti tentang program PKH di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dapat saya simpulkan bahwa pelaksanaan program PKH kurang efisien, dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Program Keluarga Harapan tersebut, dimana survei yang dilakukan pemerintah justru tidak melibatkan masyarakat miskin. Petugas survei beralasan, masyarakat tidak mengetahui kapan survei tersebut dilakukan petugas dinas terkait.

Penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) tidak memenuhi syarat dan masih banyak masyarakat miskin tidakmendapatkan bantuan PKH yang seharusnya dapat malah tidak mendapatkan bantuan PKH yang tidak seharusnya dapat malah mendapatkan bantuan PKH dan masyarakat berharap kepada para pendamping PKH harus adil untuk memberikan bantuan Program Keluarga Harapan.

Pelaksanaan penyaluran Program Keluarga Harapan yang dilakukan oleh pendamping PKH di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tidak sesuai dengan apa yang di harapkan.. Penyalurannya dana PKH tidak lagi di dampingi oleh para pendamping PKH, mereka hanya memberikan dana PKH

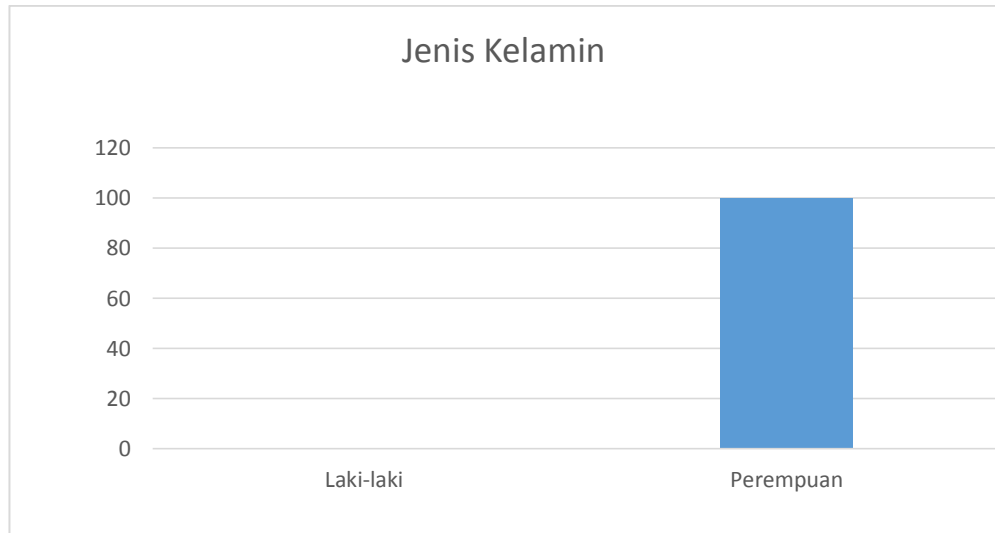
tersebut kepada warung- warung yang sudah di tentukan oleh pendamping PKH, Para pendamping PKH tidak lagi ikut mendampingi program tersebut mereka hanya memberikan dana kepada warung- warung tersebut.

Tabel 4.14
Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang Menerima PKH Di kecamatan Percut Sei Tuan

No	Desa/Kelurahan	Jumlah RT
1	Amplas	61
2	Kenangan	26
3	Tembung	101
4	Sumber Rejo Timur	32
5	Sei Rotan	130
6	Bandar Kalippa	87
7	Bandar Khalipa	75
8	Medan Estate	28
9	Laut Dendang	75
10	Sampali	137
11	Bandar Setia	59
12	Kolam	21
13	Saentis	112
14	Cinta Rakyat	66
15	Cinta Damai	92
16	Pematang Lalang	52
17	Percut	418
18	Tanjung Rejo	211
19	Tanjung Selamat	75
20	Kenangan Baru	34

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang

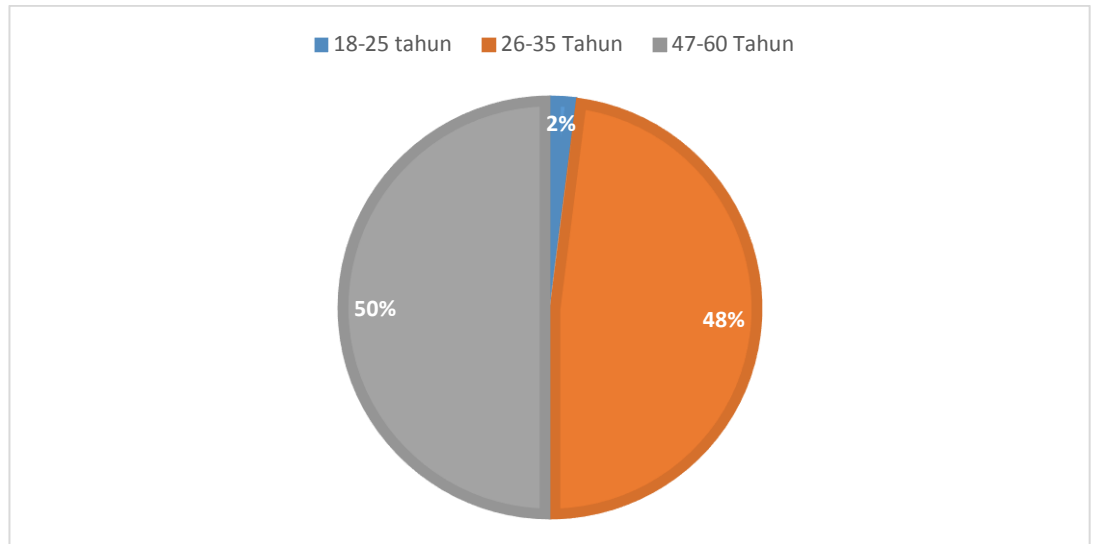
Dari kesimpulan tabel diatas dapat kita lihat bahwa bantuan yang paling banyak di kecamatan Percut Sei Tuan adalah di Desa Percut sebanyak 418 rumah tangga mendapatkan bantuan PKH di Kecamatan Percut Sei Tuan yang mendapatkan bantuan PKH paling sedikit adalah Desa Kolam dengan jumlah 21 rumah tangga.



Gambar 4.3

Keluarga Penerima (KPM) Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari data diatas dapat dilihat 100 responden 100% keluarga Penerima Manfaat (KPM) semua menerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang berjenis kelamin adalah Perempuan dimana pada program Keluarga Harapan (PKH) ini sebagai Kepala Rumah Tangga adalah perempuan pada saat menerima atau rapat tentang Program Keluarga Harapan dikarenakan perempuan yang pandai berbicara atau hanya perempuan yang berani bertanya sesuatu hal tentang Program Keluarga Harapan. Penelitian ini kebetulan yang menjadi sampel Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Percut Sei Tuan hanya kepala keluarga perempuan.

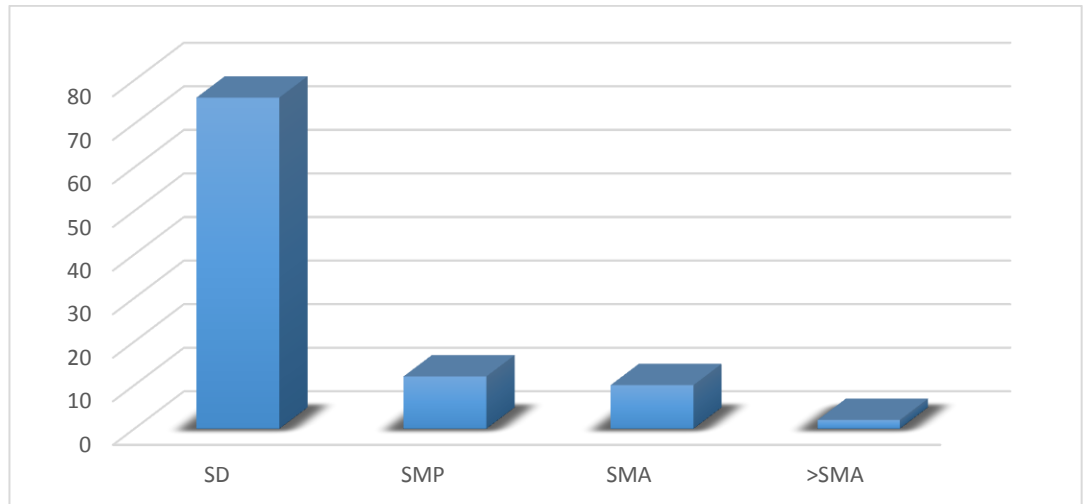


Gambar 4.4

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Berdasarkan Umur

Dari data diatas dapat dilihat bahwa usia keluarga penerima manfaat yang 100 responden, mulai dari 18-60 tahun hingga tertua 60 tahun. Jumlah penerima KPM terbanyak adalah usia 47-60 tahun yaitu 50% atau 50 responden . dengan jumlah penerima KPM paling sedikit adalah berusia 18-25 tahun yaitu 2 responden . kemudian untuk usia 26-35 tahun adalah 48 responden . mengapa usia 47-60 yang banyak menerima PKH, karena memang di

Kecamatan Percut Sei Tuan lebih banyak KPM yang usianya tidak terlalu tua karena rata-rata masih memiliki anggota keluarga yang masih sekolah, sehingga kepala keluarga yang di telitipun lebih banyak usia tidak terlalu tua dibandingkan usia tua.

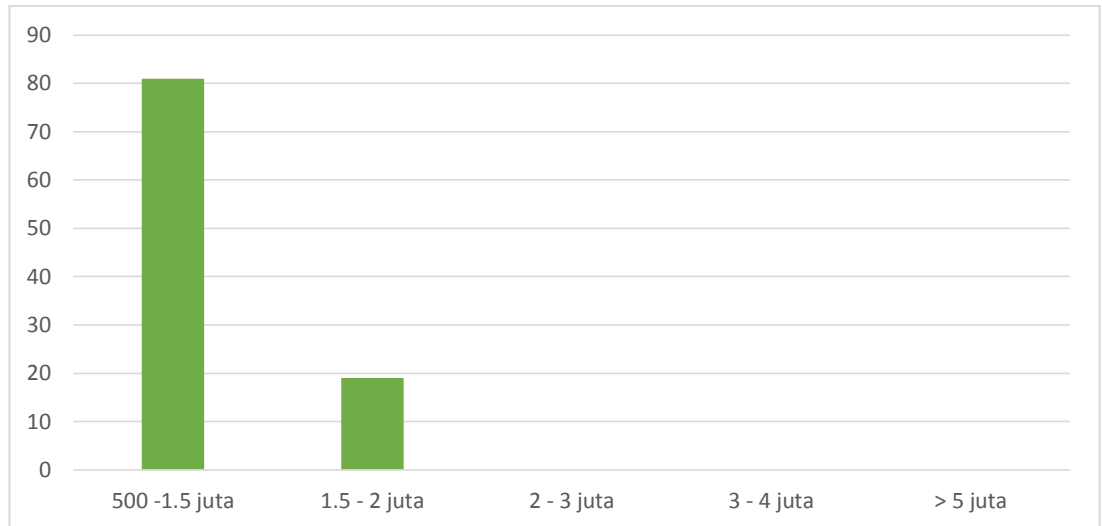


Gambar 4.5

Keluarga Penerima Manfaat Berdasarkan Pendidikan (Suami)

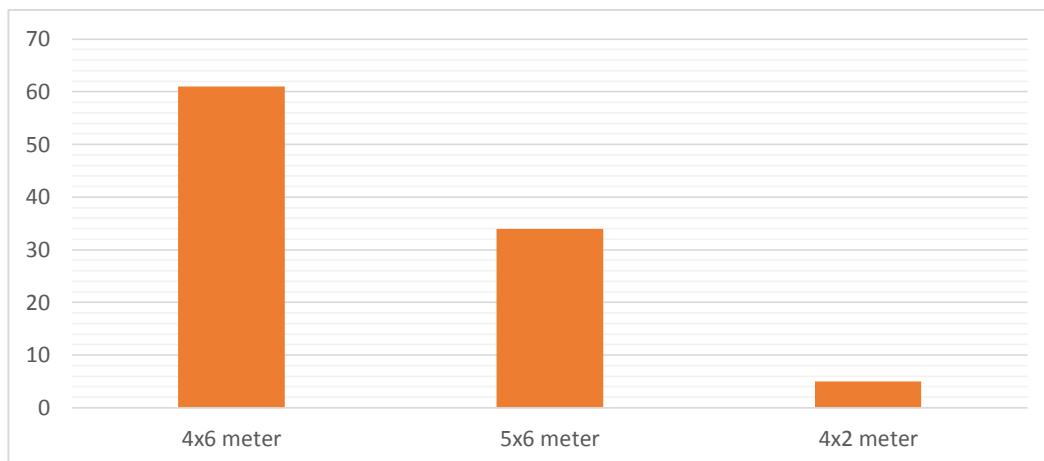
Dari data diatas 100 sampel Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diatas maka kita bisa melihat bahwa status pendidikannya lebih banyak jenjang SD yaitu sebanyak 76 responden atau 76%, dan yang paling sedikit jenjang SMP adalah 12 reponden atau 12% kepala rumah tangga (suami) sedangkan tamatan SMA sebesar 10 responden atau 10% kepala rumah tangga (suami) dan untuk diatas SMA hanya sebesar 2 responden atau 2% kepala rumah tangga (suami).

Rata-rata masyarakat Keluarga Penerima Manfaat(KPM) di Kecamatan Percut Sei Tuan ini tingkat pendidikannya masih rendah maka dari itupandangping program Keluarga Harapan (PKH) inilah memberikan mereka arahan agar tetap memberikan semangat dan arahan kepada ibu-ibu yang menerima PKH agar anak-anak mereka mereka disekolahkan agar mampu meningkatkan kualitas pendidikan yang di harapkan.



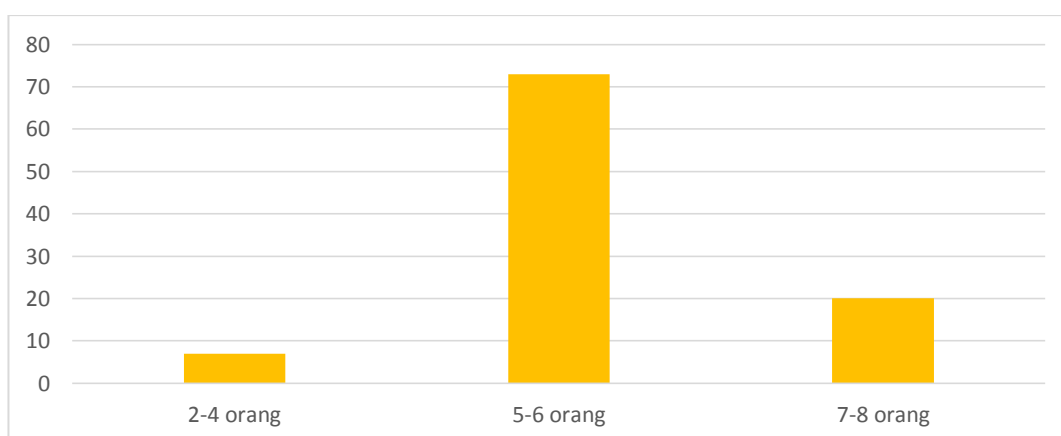
Gambar 4.6
Keluarga Penerima Manfaat Berdasarkan Penghasilan/Bulan

Dari data 100 sampel Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di atas maka kita dapat melihat bahwa jumlah penghasilan rumah tangga perbulannya lebih banyak Rp.500.000 > 1.500.000 sebanyak 81 responden atau 81% dari 100 sampel, dan yang paling sedikit berjumlah 19 responden atau 19% yang mendapatkan penghasilan Rp. 1.500.000 > 2.000.000 dikarenakan penghasilan dari pekerjaan mereka setiap perbulannya sesuai dengan pendapatan rumah tangga. Selama penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menurut peneliti pendapatan keluarga penerima manfaat yang menjadi sampel ini sesuai dengan yang dikatakan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) maka keluarga penerima manfaat sesuai dengan kriterianya.



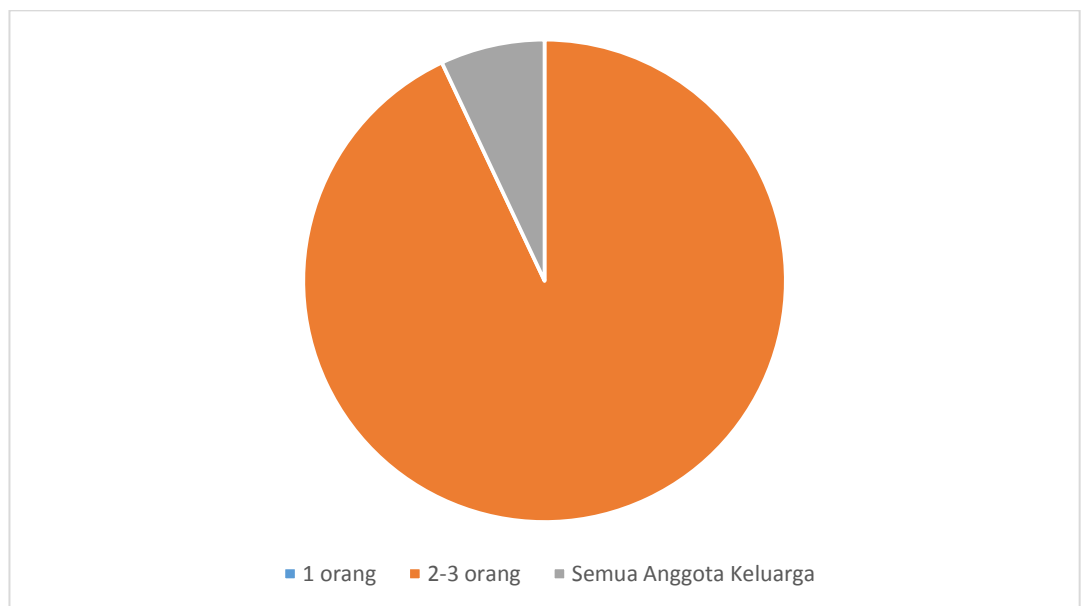
Gambar 4.7
Luas Bangunan Yang di Tempati

Dari data diatas dapat dilihat 100 sampel keluarga penerima manfaat bahwa luas bangunan yang di tempati Keluarga Penerima Manfaat(KPM) paling banyak adalah berukuran 4x6 Meter sebanyak 61 responden atau 61% yang menempati luas bangunan tersebut, dan ukuran 5x6 Meter sebanyak 34 responden atau 34% yang paling sedikit adalah berukuran 4x2 Meter sebanyak 5 responden atau 5%.serta bangunan tersebut diberikan oleh orang tua atau warisan.



Gambar 4.8
Jumlah Orang/ Rumah Tangga Keluarga Penerima Manfaat

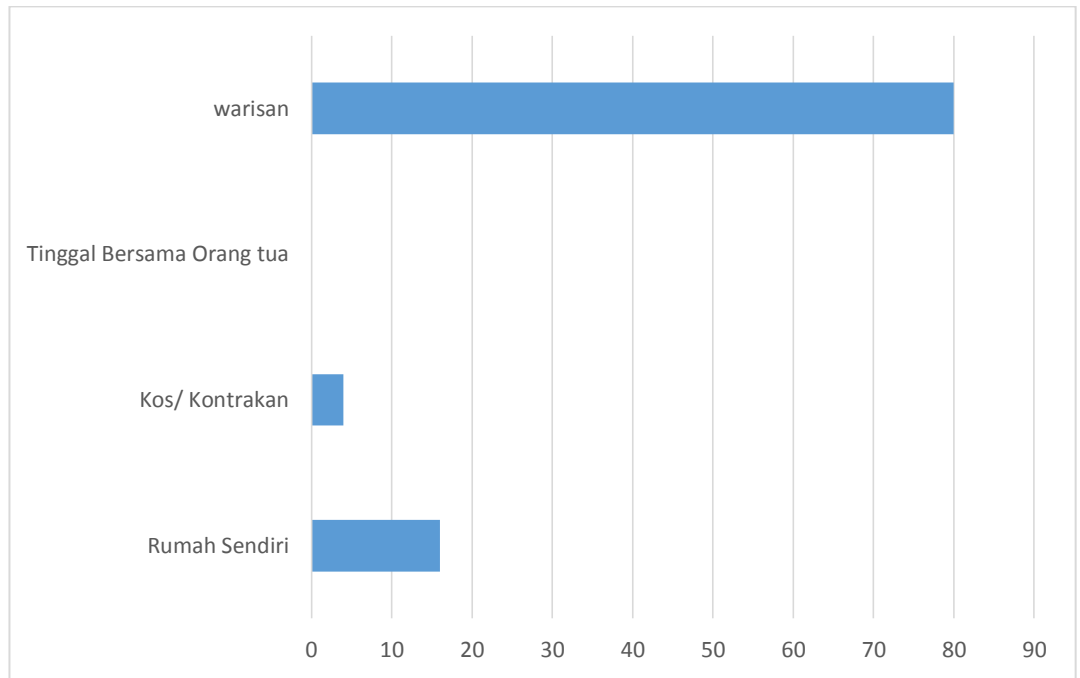
Dari tabel diatas dapat kita lihat 100 KPM bahwa jumlah orang dalam rumah tangga paling banyak 5-6 berjumlah 73 responden atau 73%, dan jumlah orang dalam rumah tangga yang 7-8 orang berjumlah 20 responden atau 20%, serta yang paling sedikit yaitu jumlah orang dalam rumah tangga 2-4 orang berjumlah 7 responden atau 7%. Dimana jumlah tanggungan yang paling banyak dalam satu rumah rata-rata 5-6 orang, karena rata-rata masyarakat masih banyak mempunyai anak.



Gambar 4.9
Jumlah Penerima PKH dalam Rumah Tangga

Dari data diatas dapat kita lihat 100 responden Keluarga Penerima Manfaat (KPM), jumlah penerima program keluarga harapan (PKH) dalam rumah tangga yang paling banyak 2-3 orang sebanyak 93 responden atau 93% dan paling sedikit semua anggota rumah tangga sebanyak 7 orang, dimana semua anggota rumah tangga mendapatkan program keluarga harapan (PKH) dalam penelitian ini berjumlah responden dikarenakan ibu rumah tangga dalam keadaan

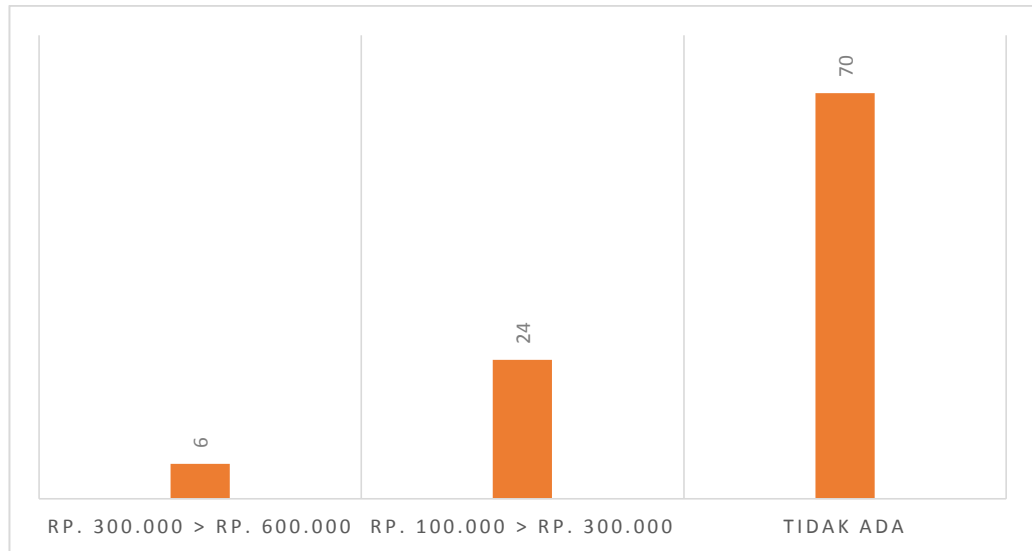
hamil dan berjumlah 1 orang yang mendapatkan program keluarga harapan (PKH) pada penelitian ini tidak ada.



Gambar 4.10

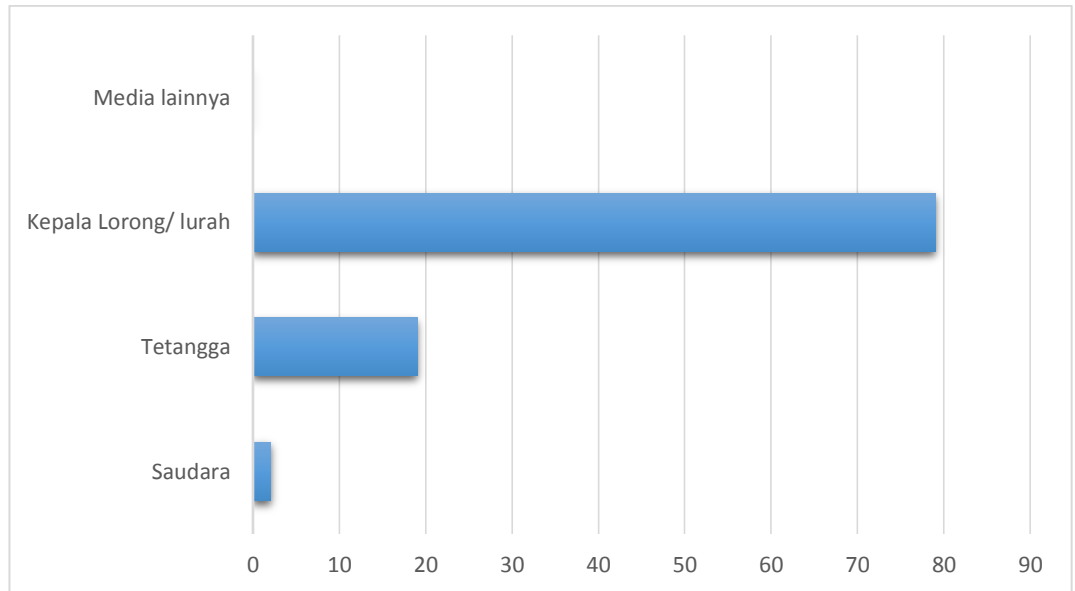
Status Kepemilikan Rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Dari data di atas dapat kita lihat status kepemilikan rumah keluarga penerima manfaat 100 responden status kepemilikan rumah mereka berjumlah 80 responden atau 80% rumah mereka adalah pemberian orang tua atau warisan. Sedangkan rumah sendiri 16 responden atau 16%, dan mengontrak sebanyak 4 rumah atau 4% dan tinggal bersama orang tua tidak ada. Dimana pada Kecamatan Percut Sei Tuan ini kebanyakan memperoleh rumah dari orang tuanya.



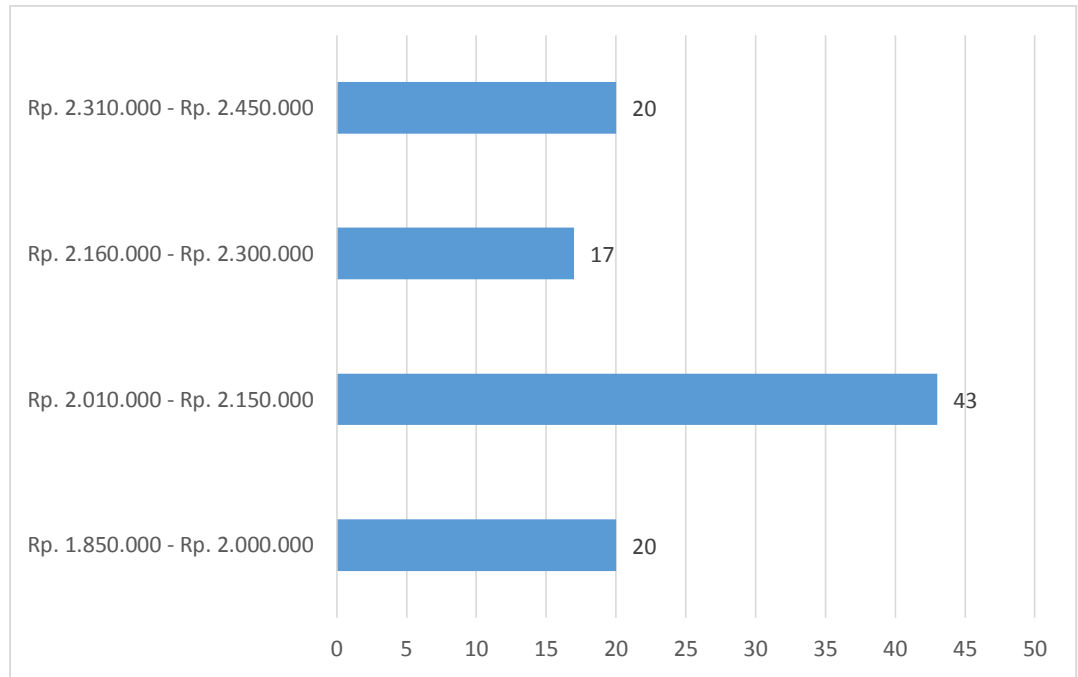
Gambar 4.11
Jumlah Tabungan Rumah Tannga Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) Dalam/Bulan

Dari data diatas dapat dilihat 100 responden Keluarga Penerima Manfaat di atas dapat kita lihat bahwa jumlah tabungan ibu rumah tangga dalam sebulan. 70 reaponden atau sebanyak 70% yang tidak memiliki tabungan sama sekali, dan 24 responden atau 24% memiliki tabungan sebesar Rp. 1.00.000>300.000 perbulannya, dan 6 responden memiliki tabungan sebesar Rp. 300.000> 6.00.000 perbulannya. Dimana masyarakat di kecamatan Percut Sei Tuan tidak memegang uang simpanan atau tabungan sama sekali dikarenakan pendapatan mereka pun perbulannya kadang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.



Gambar 4.12
Keluarga Penerima Manfaat Berdasarkan Informasi Yang di Dapatkan
Tentang PKH

Dari data 100 sampel di atas dapat kita lihat bahwa cara seleksi mendapatkan PKH berdasarkan seleksi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berjumlah 95 responden atau 95% , 2 responden atau 2% di seleksi oleh saudaranya karena kebetulan masih bersaudara dengan pendamping program keluarga harapan , 2 responden atau 2% diseleksi oleh kepala desa bahwa dia berhak menerima program keluarga harapan, 1 responden atau 1% diseleksi oleh kepala dusun.



Gambar 4.13

Dana PKH Yang di Terima Masyarakat/RT

Dari data 100 sampel kepala keluarga penerima manfaat diatas maka kita bisa melihat bahwa jumlah anggota keluarga dalam rumah tangga yang menerima subsidi dalam rupiah pada desember 2018 yang saya teliti Rp. 1.850.000 – Rp. 2.000.000 berjumlah 20 responden, yang mendapatkan subsidi Rp. 2.010.000 – Rp. 2.150.000 berjumlah 43 responden, yang mendapatkan subsidi Rp. 2.160.000 – Rp. 2.300.000 berjumlah 17 responden, yang mendapatkan subsidi Rp.2.310.000 – Rp. 2.450.000 berjumlah 20 responden.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di ambil beberapa kesimpulan lain:

1. Pengelolaan Dana Desa yang di terapkan oleh pemerintah desa se kecamatan Percut Sei Tuan sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Disamping itu proses penglolaan keuangan Dana Desa melibatkan masyarakat mulai drai tahapan perencanaan sampai dengan pengawasan. Meskipun pengelolaan Dan Desa dilakukan sangat baik tetapi belum juga bisa mengurangi besarnya tingkat kemiskinan di Kecamatan Percut Sei Tuan.
2. Pelaksaaan pertanggungjawaban Dana Desa oleh pemerinta Desa secara teknis maupun administrasi sudah baik. Tetapi dalam hal laporan realisasi penggunaan Dana Desa, pemerintah desa hanya mebuat laporan dengan format seadanya. Dikarenakan belum adanya aturan spesifik yang yang membahas mengenai format yang seharusnya dilakukan.
3. Penelitian yang dilakukan terhadap 100 sampel di kecamatan Percut Sei Tuan yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) sudah baik, hal ini dapat dilihat dari anak keluarga penerima manfaat bantuan PKH usia sekolah yang sudah terdaftar dan mengikuti kehadiran sekolah 85% serta partisipasi kesadaran ibu hamil/menusui dan mempunyai anak balita untuk melakukan pemeriksaan kesehatan

rutin sehingga anak-anak mereka tidak terserang gizi buruk serta anaknya kelak memutuskn rantai kemiskinan.

4. Pencapaian tujuan PKH di Kecamatan Percut Sei Tuan sudah cukup baik meskipun hasilnya belum maksimal karena perubahan yang terjadi pada Keluarga Penerima Manfaat masih bersifat sementara yang artinya jika program ini ditiadakan maka kemungkinan kondisi Keluarga Penerima Manfaat akan kembali pada kondisi seperti semula. Hal ini masih banyak dikarenakan masih banyak keluarga yang belum memiliki kesadaran untuk benar-benar memperbaiki kualitas kehidupannya.
5. Responsivitas Keluarga Penerima Manfaat terhadap kehadiran PKH sangat baik. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat responsivitas negative dari peserta yang merasa bahwa bantuan yang diterima pada saat ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga khususnya bagi peserta yang memiliki jumlah anak cukup banyak.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian ini, maka peneliti mencoba member beberapa saran kepada elemen- elemen yang tertarik pada penelitian ini.

Adapun saran- saran yang dapat peneliti berikan pada skripsi ini adalah :

1. Bagi pemerintah desa perlu melaukan sosialisasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui proses implementasi penggunaan Dana Desa . sehingga usulan-usulan yang diberikan oleh masyarakat menjadi lebih terarah.

2. Dan bagi pemerintah harus lebih banyak memberikan bantuan di Kecamatan Percut Sei Tuan karena masih banyak masyarakat yang belum terbantu dikarenakan ekonomi mereka yang rendah. serta PKH lebih banyak disalurkan lagi di kecamatan Percut Sei Tuan itu sendiri.
3. Pendamping harus tegas kepada Peserta PKH mengenai kewajiban dan penggunaan bantuan sosial yang telah diterima oleh peserta.
4. Program ini masih harus diperluas sehingga mampu mencakup seluruh Keluarga Sangat Miskin di Kecamatan Percut Sei Tuan . Metode pendataan calon peserta harus lebih tepat dengan cara melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah calon peserta. Selain itu, memprioritaskan prinsip keadilan yaitu supaya setiap Keluarga Penerima Manfaat mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

- Arsyad, L. (1999) *PengantarPerencanaandan Pembangunan Ekonomi Daerah*, EdisiPertama, BPFE, Yogyakarta
- Ebel, Robert D danSeidarYilmaz. 2002. *Concept of Fiscal Decentralization and World Wide Overview*. World Bank Institute.Available: <http://www.worldbank.org>
- Gilarso, T. (2004). *PengantarIlmuEkonomiPengantarMakro* (EdisiRevisi). Yogyakarta: PenerbitKanisius
- Guritno., M. (1994). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Harahap, SofyanSyafri. 2006. *AnalisisKritisAtasLaporanKeuangan*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
- Jhingan, M. (2010). *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan.*: PT. Raja GrafindoPersada.
- Jhingan M.L. 2012. *Ekonomi Pembangunan danPerencanaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindoPersada
- KementerianDesa, Pembangunan Daerah TertinggaldanTransmigrasi. (2016). PeraturanMenteriDesa, Pembangunan Daerah TertinggaldanTransmigrasiNomor 10 Tahun 2016 tentangPedomanPengelolaan Data danInformasiDesa, Daerah TertinggaldanTransmigrasi.
- Kemendesa. (2016). *Data Desa, Data Daerah TertinggaldanTertentu, Data Transmigrasi*. <http://www.kemendesa.go.id>. (Diaksespada 2 Desember 2018).
- Kuncoro,Mudrajat 1997, *Ekonomi Pembangunan, TeoriMasalahdanKebijakan, UPP AMP YKPN*, Yogyakarta
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomidan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, danPeluang*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajat. 2006. “*Ekonomi Pembangunan*”, PenerbitSalembaEmpat,Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar-dasarEkonomika Pembangunan, UPP STIM YKPN* Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. (2013). *MetodeRisetuntukBisnis* (EdisiKeempat). Yogyakarta: Erlangga.
- Manik, R. E., &Hidayat, P. (2010). *AnalisaKualitasAntaraPengeluaranPemerintahdanPertumbuhanEkonomi Sumatera Utara*. *JurnalKeuangandanBisnis*, 49.
- Mangkoesoebroto, G. (2001). *EkonomiPublik* (EdisiKetiga). Yogyakarta: BPFE.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.

- Sukirno, Sadono. 2000. *Makroekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono (2005). *Ekonomi Pembangunan: Proses,
Masalah dan Dasar Kebijakan* Jakarta: Kencana Persada Media Group.
- Sukirno, Sadono. 2016. *Teori Pengantar Makroekonomi Edisi Ketiga*. Rajawali Pers:
Jakarta
- Sumitro Djohadikusumo. 1995.
*Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi
Pembangunan*. Jakarta
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*.
Edisi ke Sembilan. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1*
(Edisi Kesebelas). Jakarta: Erlangga



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 52/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/22/11/2018

Nama Mahasiswa : Muhamad Taufik Lubis
NPM : 1505180032
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : -
Tanggal Pengajuan Judul : 22/11/2018
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor atau;
Alternatif judul lainnya.....
.....(Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Nama Dosen pembimbing : Prawidya Hariani RS (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing :
..... (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

(Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si.)

Medan,

Dosen Pembimbing

(.....)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 52/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/22/11/2018

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 22/11/2018

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhamad Taufik Lubis
NPM : 1505180032
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : -

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : -

Rencana Judul : 1. Analisis Dampak Pengaruh Kebijakan Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
2. -
3. -

Objek/Lokasi Penelitian : -

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Muhamad Taufik Lubis)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Muhamad Taufik Lubis
NPM : 1505180032
Konsentrasi : -
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Ekonomi Pembangunan)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat “Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing “ dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan ~~20~~ Januari 2019

Pembuat Pernyataan



Muhamad Taufik Lubis

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.